

AGENDA PRIORITAS
PENGAWASAN **2026**

**KAWAL LANGKAH BERSAMA
MEMBANGUN
BANGSA**





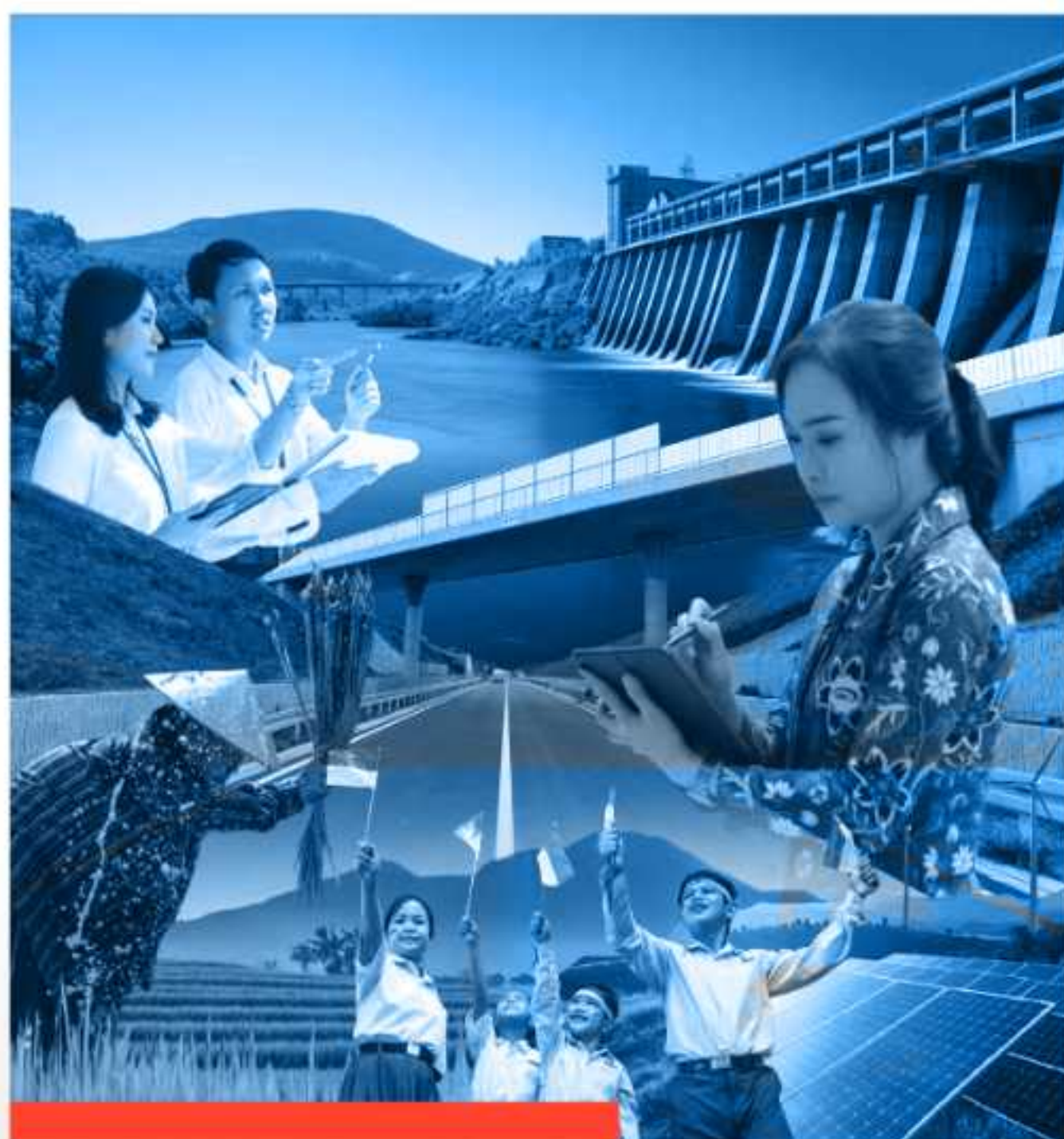
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

AGENDA PRIORITAS
PENGAWASAN **2026**

KAWAL LANGKAH BERSAMA
MEMBANGUN
BANGSA

Disusun oleh:

Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan



Alas Kata

Setelah pemerintah meletakkan fondasi kebijakan dan program prioritas di tahun 2025, pemerintah memasuki fase yang lebih intensif di tahun 2026 dalam menjalankan 8 misi pembangunan (Asta Cita) guna mencapai Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Pada tahun inilah, arah pembangunan nasional mulai masuk ke tahap percepatan, utamanya melalui target prioritas nasional yang meliputi Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan, dan Peningkatan SDM Berkualitas. Keberhasilan tahun 2026 menjadi penentu bagi percepatan program-program unggulan yang diharapkan menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengawal stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, peran pengawasan BPKP juga menjadi semakin krusial. BPKP sebagai auditor internal pemerintah, memiliki mandat strategis untuk mengawal agar setiap program pemerintah pada tahun 2026 berjalan sesuai tujuan, meminimalkan risiko kegagalan, serta mendorong efisiensi penggunaan sumber daya. Tahun 2026 menjadi momentum strategis bagi BPKP untuk memperkuat kontribusinya melalui agenda pengawasan yang lebih terarah, sekaligus responsif terhadap isu-isu aktual.

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) 2026 BPKP bertajuk "Kawal Langkah Bersama Membangun Bangsa" disusun sebagai dokumen strategis yang memandu arah dan fokus pengawasan BPKP yang menyajikan informasi hasil pengawasan yang akan dihasilkan, pelaksana pengawasan, dan rencana waktu penyampaian hasil pengawasan setiap topik pengawasan. APP BPKP tahun 2026 difokuskan pada 8 sektor strategis pembangunan dan mencakup 73 topik pengawasan yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat optimal kepada para *stakeholders* BPKP terutama Presiden RI. APP BPKP Tahun 2026 sekaligus menjadi rujukan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam merancang dan menyelaraskan pengawasan intern sesuai lingkup kerja masing-masing dalam rangka mewujudkan pengawasan intern yang terintegrasi, konvergen, dan efektif mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional.

**MUHAMMAD
YUSUF ATEH**

Kepala BPKP



DAFTAR ISI

ALAS KATA 3
MELIHAT LEBIH DEKAT APP 2024 5

MEET THE TEAM 6
PETA PENGAWASAN 8

A.

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) UNGGUL DAN BERDAYA SAING 13

- 1. Pendidikan 16
- 2. Kesehatan 18

E.

TRANSFORMASI EKONOMI 55

- 1. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri dalam Negeri 58
- 2. Peningkatan Keterserapan dan Perlindungan Tenaga Kerja 62
- 3. Pengembangan Kawasan dan Pembangunan Kewilayahan 64

B.

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 21

- 1. Pengentasan Kemiskinan 24
- 2. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masyarakat 26

F.

KETAHANAN PANGAN 67

- 1. Peningkatan Produksi Pangan 70
- 2. Keterjangkauan dan Ketersediaan Pangan 74

C.

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS 29

- 1. Pembangunan Infrastruktur Konektivitas 32
- 2. Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar yang Berkualitas 34

G.

KETAHANAN ENERGI 77

- 1. Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan, dan Transisi Energi 80

D.

AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAN KEKAYAAN NEGARA/DAERAH YANG DIPISAHKAN 37

- 1. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Pusat 40
- 2. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah/Desa 44
- 3. Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah yang Dipisahkan 52

H.

PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH 81

- 1. Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kecurangan 84
- 2. Penguatan Tata Kelola Tematik 86

KALENDER HASIL PENYAMPAIAN HASIL PENGAWASAN PRIORITAS 89

Melihat lebih dekat **APP 2026**

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) menyajikan pemetaan isu pembangunan strategis yang menjadi prioritas pengawasan BPKP, prinsip pelaksanaan pengawasan, penjabaran rencana pengawasan, distribusi pelaksana dan sebaran waktu pelaporan.

Jangkauan Pengawasan Prioritas Tahun 2026

APP Tahun 2026 memetakan 8 (delapan) sektor, 17 (tujuh belas) tema dan 73 (tujuh puluh tiga) topik strategis keuangan dan pembangunan nasional yang menjadi fokus pengawasan BPKP tahun 2026

Prinsip-Prinsip Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan intern harus mengedepankan kecepatan dan ketepatan waktu, mengutamakan pencegahan kebocoran keuangan negara, serta mendorong kolaborasi dan sinergi. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan dapat memastikan kelancaran dan kebermanfaatannya dengan mengawal Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Penjabaran Rencana Pengawasan

Dalam APP tahun 2026 terdapat tingkatan penyimpulan hasil pengawasan, mencakup tingkat sektor, tingkat tema dan tingkat topik. Pada setiap sektor yang diawasi telah dirancang simpulan strategis yang dibangun dengan seluruh informasi yang dikonsolidasikan dari tingkat tema maupun topik.



Kerangka Waktu Penyampaian Ikhtisar Hasil Pengawasan

Bagian akhir APP 2026 ditutup dengan kalender penyampaian ikhtisar hasil pengawasan serta distribusi penanggung jawab dan pelaksana tugas pengawasan. Ikhtisar hasil pengawasan akan disampaikan kepada *stakeholders* secara triwulanan yaitu pada pekan pertama setelah triwulan tersebut berakhir

**AGUSTINA
ARUMSARI**

Wakil Kepala BPKP





Meet **THE TEAM**

RADEN MAS ARIS SENTOSA

Sekretaris Utama BPKP

ARYANTO WIBOWO

Deputi Bidang
Pengawasan Instansi
Pemerintah Bidang
Perekonomian,
Infrastruktur, dan
Pembangunan
Kewilayahan

SALLY SALAMAH

Deputi Bidang
Pengawasan Instansi
Pemerintah Bidang
Politik, Keamanan,
Hukum, Pembangunan
Manusia, dan
Kebudayaan



SUSILO WIDHYANTORO

Deputi Bidang
Pengawasan Instansi
Pemerintah Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pangan

SETYA NUGRAHA

Deputi Bidang
Pengawasan
Penyelenggaraan
Keuangan Daerah

IWAN TAUFIQ PURWANTO

Deputi Bidang
Akuntan Negara

SUTRISNO

Deputi Bidang
Investigasi

PETA PENGAWASAN PRIORITAS BPKP 2026

8 SEKTOR
17 TEMA
73 TOPIK

A PEMBANGUNAN SDM YANG BERKUALITAS

TEMA 1.

PENDIDIKAN

TOPIK

- A. Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas
- B. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi
- C. PHTC Bidang Pendidikan (Digitalisasi Pendidikan, Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas, serta Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul)
- D. PHTC Makan Bergizi Gratis

TEMA 2.

KESEHATAN

TOPIK

- A. Revitalisasi Integrasi Layanan Primer
- B. Penguatan akses dan mutu layanan kesehatan lanjutan
- C. PHTC Bidang Kesehatan (Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Pembangunan RS Lengkap Berkualitas)
- D. PHTC Pengentasan Tuberkulosis
- E. Pencegahan dan Penurunan Stunting



B KESEJAHTERAAN SOSIAL

TEMA 1

PENGENTASAN KEMISKINAN

TOPIK

- A. Tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN)
- B. Perlindungan sosial melalui pengurangan beban dan peningkatan pendapatan (Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif)
- C. Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan
- D. PHTC Sekolah Rakyat

TEMA 2

PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS MASYARAKAT

TOPIK

- A. PHTC Tata kelola koperasi desa/kelurahan merah putih
- B. Tata kelola Peningkatan Akses Pembiayaan bagi UMKM
- C. Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional

C PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS

TEMA 1

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS

TOPIK

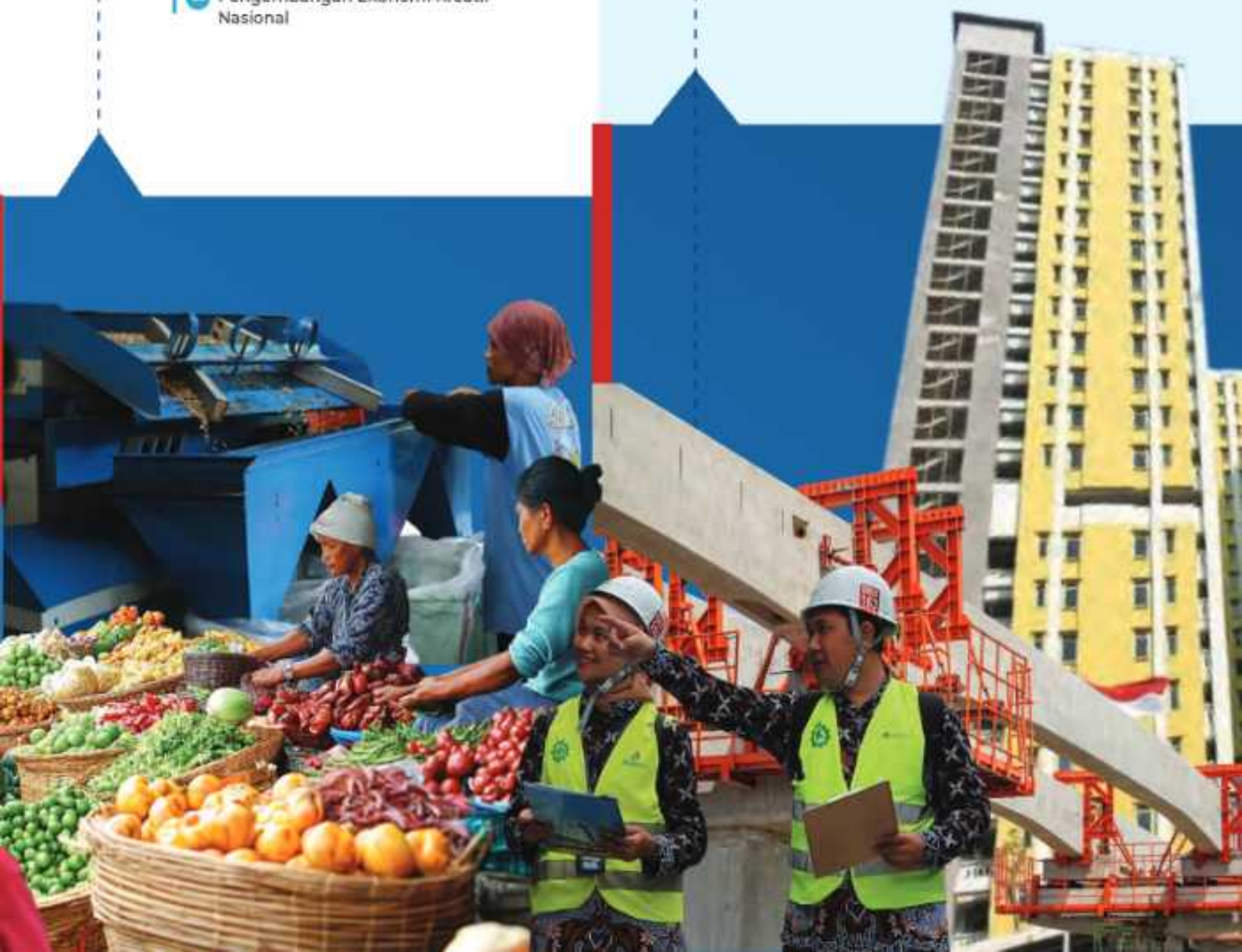
- A. Infrastruktur Jaringan Jalan dan Jembatan (termasuk jalan tol)
- B. Infrastruktur Pelabuhan
- C. Infrastruktur Bandara
- D. Infrastruktur Perkeretaapian

TEMA 2

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR YANG BERKUALITAS

TOPIK

- A. Penyediaan Perumahan Rakyat yang Layak Huni dan Terjangkau (termasuk Program Penyediaan 3 juta rumah)
- B. Penyediaan Air Baku (Jaringan Irigasi) dan Air Minum (SPAM) yang Layak dan Berkualitas
- C. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Persampahan



D AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAN KEKAYAAN NEGARA/DAERAH YANG DIPISAHKAN

TEMA 1.

AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

TOPIK

- A. Optimalisasi Penerimaan Perpajakan
- B. Optimalisasi PNBP
- C. Tata Kelola Pertambangan dalam Kawasan Hutan
- D. Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan
- E. Efektivitas Belanja Perpajakan
- F. Efektivitas Implementasi Kebijakan Efisiensi Alokatif Belanja Pemerintah Pusat
- G. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat (termasuk PBJ sebagai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja)
- H. Pengelolaan Pembiayaan Utang Pemerintah

TEMA 2.

AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH/DESA

TOPIK

- A. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
- B. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah
- C. Disiplin Belanja Pemerintah Daerah
- D. Pengelolaan Pembiayaan Daerah
- E. Efektivitas Transfer Fiskal di Daerah (DAU, DAK, dan DBH)
- F. Efektivitas Dana Otonomi Khusus
- G. Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa
- H. Tata Kelola PBJ Daerah

TEMA 3.

AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA/DAERAH YANG DIPISAHKAN

TOPIK

- A. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BUMN/Danantara
- B. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BUMD
- C. Akuntabilitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan BLU/BLUD

E TRANSFORMASI EKONOMI

TEMA 1.

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING INDUSTRI DALAM NEGERI

TOPIK

- A. Penguatan Daya Saing Industri Pengolahan
- B. Penyelamatan Industri Padat Karya
- C. Percepatan Pembangunan Ekosistem Industri Bateral
- D. Penguatan Investasi dan Kemudahan Perizinan
- E. Pengembangan Industri Pariwisata yang Berkualitas
- F. Tata Kelola Keamanan dan Mutu Produk Industri dalam Kemasan

TEMA 2.

PENINGKATAN KETERSERAPAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

TOPIK

- A. Penguatan Perlindungan Tenaga Kerja
- B. Peningkatan Keterserapan Tenaga Kerja

TEMA 3.

PENGEMBANGAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

TOPIK

- A. Pengembangan Kawasan Sentra Ekonomi dan Perdagangan
- B. Penguatan Pertumbuhan Ekspor dan Perdagangan Domestik Berbasis Kewilayahan
- C. Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- D. Pengawasan Kewilayahan Pembangunan Perkotaan (*Urban Development*)



F KETAHANAN PANGAN

TEMA 1.

PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN

TOPIK

- A. Tata Kelola Lahan Pertanian
- B. Tata Kelola Program Bibit dan Benih Unggul
- C. Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
- D. Peningkatan Infrastruktur Pangan Nasional
- E. Peningkatan Dukungan Peralatan Produksi Pangan (Alsintan)
- F. Penanganan Pasca Panen
- G. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian

TEMA 2.

KETERJANGKAUAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN

TOPIK

- A. Stabilisasi Harga dan *Supply Chain* Komoditas Pangan
- B. Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah
- C. Tata Kelola Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (KSPEAN)



G KETAHANAN ENERGI

TEMA 1.

KETERSEDIAAN PASOKAN, KETERJANGKAUAN, DAN TRANSISI ENERGI

TOPIK

- A. Ketersediaan Pasokan Energi (Gas Bumi, Minyak Bumi, dan Batubara)
- B. Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi (Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak/BBM, dan Listrik)
- C. Transisi Energi Menuju Pembangunan Rendah Karbon



H PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

TEMA 1.

PENGUATAN TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KECURANGAN

TOPIK

- A. Kapabilitas APIP
- B. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- C. Pengendalian Kecurangan

TEMA 2.

PENGUATAN TATA KELOLA TEMATIK

TOPIK

- A. Kemudahan Perizinan di Daerah
- B. Penanggulangan Bencana
- C. Kemudahan Perizinan di Daerah



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

- **PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
UNGGUL DAN BERDAYA SAING**





PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) UNGGUL DAN BERDAYA SAING

Gambaran penguatan pembangunan SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing

Analisis atas strategi penguatan pembangunan SDM di Indonesia

Analisis atas implementasi pelaksanaan program penguatan pembangunan SDM di Indonesia

SIMPULAN TINGKAT SEKTOR INI
DIBANGUN DARI SIMPULAN ANTARA
PADA 2 TEMA DI DALAMNYA





TEMA 1.
PENDIDIKAN



TEMA 2.
KESEHATAN





- 1 Analisis atas progres kebijakan sistem pendidikan nasional
- 2 Analisis peningkatan aksesibilitas pendidikan untuk meningkatkan angka partisipasi
- 3 Analisis peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong SDM unggul dan berdaya saing
- 4 Analisis atas efektivitas PHTC dalam mendukung pendidikan berkualitas
- 5 Analisis akar penyebab (root cause) permasalahan
- 6 Analisis risiko pelaksanaan program dan rekomendasi mitigasinya
- 7 Saran dan rekomendasi perbaikan kebijakan/ implementasi

A

**PEMERATAAN
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
YANG BERKUALITAS**


- 1 Analisis atas ketepatan, kecukupan, dan keselarasan kebijakan pemerataan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/D).
- 2 Analisis kelembagaan dan koordinasi lintas sektoral pada K/L/D
- 3 Analisis atas perencanaan, implementasi, dan akuntabilitas peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, termasuk:
 - a. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan, termasuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - b. Pemenuhan kebutuhan, pemerataan guru, dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensinya;
 - c. Pembiayaan pendidikan dasar dan menengah di satuan pendidikan negeri dan swasta, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) (kecukupan, ketepatan sasaran, dan pemanfaatan pembiayaan);
 - d. Kurikulum pendidikan;
 - e. Gaji dan tunjangan guru, termasuk mekanisme penyaluran tunjangan guru secara langsung.
- 4 Analisis atas akurasi, validitas dan reliabilitas data pendidikan (data guru, siswa, sarana dan prasarana)
- 5 Analisis efektivitas atas program pemerataan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas
- 6 Analisis root cause permasalahan
- 7 Analisis risiko pelaksanaan program dan rekomendasi mitigasinya
- 8 Analisis risiko kecurangan (*fraud*) dan rekomendasi mitigasinya
- 9 Saran dan rekomendasi perbaikan kebijakan/ implementasi

B

**PENINGKATAN
AKSES DAN
KUALITAS
PENDIDIKAN TINGGI**


- 1 Analisis atas ketepatan, kecukupan dan keselarasan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi pada K/L/D
- 2 Analisis kelembagaan dan koordinasi lintas sektoral pada K/L/D
- 3 Analisis atas perencanaan, implementasi, dan akuntabilitas peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, termasuk:
 - a. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan
 - b. Pemenuhan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensinya
 - c. pembiayaan pendidikan tinggi, seperti Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Kantor Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) (kecukupan, ketepatan sasaran, dan pemanfaatan pembiayaan).
- 4 Analisis efektivitas atas peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi
- 5 Analisis integrasi data pendidikan pada seluruh kementerian/lembaga (K/L) penyelenggaraan pendidikan tinggi
- 6 Analisis root cause permasalahan
- 7 Analisis risiko *fraud* dan rekomendasi mitigasinya
- 8 Saran dan rekomendasi perbaikan kebijakan/ implementasi



C

PHTC BIDANG PENDIDIKAN (DIGITALISASI PENDIDIKAN, REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DAN MADRASAH YANG BERKUALITAS, SERTA PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH UNGGUL)



1. Analisis atas kecukupan dan keselarasan desain kebijakan intervensi pendidikan melalui digitalisasi pendidikan, revitalisasi sarana dan prasarana (sarpras), serta Sekolah Unggul Garuda
2. Analisis koordinasi dan kelembagaan antar K/L/D terkait pelaksanaan PHTC digitalisasi pendidikan, revitalisasi sarpras, serta Sekolah Unggul Garuda
3. Analisis progres pelaksanaan PHTC digitalisasi pendidikan, revitalisasi sarpras, serta Sekolah Unggul Garuda
4. Analisis keandalan data perencanaan kebutuhan sarana prasarana
5. Analisis implementasi, dan akuntabilitas atas intervensi pendidikan

a. Digitalisasi Pendidikan:

- Perencanaan kebutuhan digitalisasi pendidikan
- Akuntabilitas keuangan digitalisasi pendidikan
- Kesiapan guru dan siswa serta sarana pendukungnya, dan
- Pemanfaatan digitalisasi pendidikan

b. Revitalisasi sarpras sekolah dan madrasah yang berkualitas

- Perencanaan kebutuhan revitalisasi sarpras pendidikan
- Akuntabilitas keuangan revitalisasi sarpras
- Pemanfaatan sarpras

c. Penyelenggaraan Sekolah Unggul transformasi dan baru:

- Pembinaan siswa (perencanaan, akuntabilitas, dan monitoring pengukuran capaian pembinaan siswa)
- Guru (perencanaan kebutuhan guru, akuntabilitas pelaksanaan rekrutmen guru, monitoring pengukuran capaian pelatihan guru)
- Kurikulum (perencanaan kebutuhan dan penyesuaian kurikulum)
- Sarpras (perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pembangunan, akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan, serta pemanfaatan sarpras)
- Dukungan manajemen (perencanaan kebutuhan jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan, akuntabilitas pelaporan kinerja dan keuangan)
- Beasiswa (perencanaan kebutuhan, kesiapan integrasi dan interoperabilitas dengan data sosial, kesiapan seleksi penerima beasiswa)

6. Analisis ketepatan dan kecukupan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan PHTC Bidang Pendidikan
7. Analisis root cause permasalahan
8. Analisis risiko fraud dan rekomendasi mitigasinya
9. Saran dan rekomendasi perbaikan kebijakan/ implementasi

D

PHTC MAKAN BERGIZI GRATIS



1. Capaian penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) dan realisasi keuangan
2. Analisis ketepatan, kecukupan, dan keselarasan kebijakan program MBG
3. Analisis kelembagaan dan koordinasi lintas sektoral program MBG, termasuk penetapan kelembagaan dan pengorganisasian SDM
4. Analisis keandalan data penerima program makan bergizi gratis
5. Analisis ketepatan perencanaan, pengalokasian anggaran, dan implementasi program makan bergizi gratis, terutama prioritas pembangunan Sentra Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG) pada wilayah miskin:
 - a. Pembentukan SPPG
 - b. Penetapan penerima manfaat
 - c. Perencanaan menu
 - d. Pengadaan
 - e. Pengolahan dan pemorsian
 - f. Distribusi
 - g. Penyantapan
 - h. Pengolahan limbah
 - i. Komunikasi dan partisipasi publik
6. Analisis ketepatan dan kecukupan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan MBG
7. Analisis akuntabilitas (keuangan dan kinerja) program makan bergizi gratis
8. Analisis efektivitas program makan bergizi gratis
9. Analisis atas hambatan dan permasalahan pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis
10. Analisis risiko fraud dan rekomendasi mitigasinya
11. Saran dan rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi





1. Analisis atas kecukupan, ketepatan dan keselarasan Rencana Induk Bidang Kesehatan pada K/L/D
2. Analisis atas kebijakan maupun implementasi atas aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Analisis atas kebijakan maupun implementasi intervensi pemerintah dalam pengentasan TBC
4. Analisis atas kebijakan maupun implementasi intervensi pemerintah dalam penanganan stunting
5. Analisis atas perlindungan jaminan kesehatan masyarakat
6. Rekomendasi perbaikan

A

**REVITALISASI INTEGRASI
LAYANAN PRIMER DAN
PHTC PEMERIKSAAN
KESEHATAN GRATIS**


Triwulan II

1. Potret sebaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang telah menerapkan ILP
2. Analisis kecukupan dan keselarasan kebijakan K/L/D dalam penerapan ILP
3. Analisis kelembagaan dan koordinasi lintas sektoral dalam penerapan ILP
4. Analisis kesiapan pelaksanaan ILP pada FKTP
 - a. Kapasitas SDM dan pemerataan tenaga kesehatan.
 - b. Sarana dan prasarana, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
5. Analisis integrasi sistem maupun data berbagai FKTP (puskesmas, posyandu maupun pustu)
6. Analisis kualitas pelayanan kesehatan (preventif, kuratif dan rehabilitatif) yang komprehensif untuk seluruh siklus hidup
7. Analisis dampak penerapan ILP yang diperkuat bagi peningkatan layanan kesehatan
8. Identifikasi root cause dan hambatan penerapan ILP
9. Analisis risiko fraud dan rekomendasi mitigasinya
10. Rekomendasi perbaikan kebijakan dan implementasi

Triwulan I dan III

1. Analisis atas kecukupan dan keselarasan desain kebijakan intervensi kesehatan melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)
2. Analisis koordinasi dan kelembagaan antara K/L/D terkait pelaksanaan PKG
3. Analisis perencanaan, implementasi, dan akuntabilitas

Pemeriksaan Kesehatan Gratis

 - 1) Potret cakupan penerima PKG
 - 2) Analisis kesiapan sarana prasarana, SDM, obat serta BMHP
 - 3) Analisis implementasi PKG
 - 4) Analisis integrasi sistem maupun ketepatan data PKG
4. Analisis dampak PKG terhadap peningkatan layanan kesehatan
5. Analisis ketepatan dan kecukupan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan PKG
6. Identifikasi root cause atas permasalahan/hambatan PKG
7. Analisis Risiko Fraud dan rekomendasi mitigasinya
8. Rekomendasi perbaikan

IGD 24 JAM



B

PENGUATAN AKSES DAN MUTU LAYANAN KESEHATAN LANJUTAN



1. Gambaran ketimpangan akses dan mutu layanan kesehatan (Potret sebaran fasilitas layanan kesehatan rujukan serta kecukupan standar sarana prasarana, penyediaan alat kesehatan, SDM, dan obat serta BMHP) (terutama daerah 3T)
2. Analisis kecukupan dan keselarasan kebijakan/peraturan di level pusat dan daerah dalam peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan lanjutan
3. Analisis ketepatan dan keandalan data sarana prasarana, alkes, obat, BMHP, dan SDM
4. Analisis sinergi dan koordinasi antar K/L/D dan Badan Usaha dalam peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan lanjutan
5. Analisis ketepatan perencanaan dan alokasi anggaran pada level pusat dan daerah dalam peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan lanjutan
6. Analisis implementasi atas penguatan akses dan mutu layanan kesehatan lanjutan (terutama daerah 3T):
 - a. Sarana dan prasarana
 - b. Penyediaan alat kesehatan, dan obat serta BMHP
 - c. SDM kesehatan (peningkatan jumlah, kualitas dan distribusi tenaga kesehatan)
7. Analisis kebermanfaatan sarana prasarana dan alat kesehatan
8. Analisis mutu layanan kesehatan KJSU dan KIA
9. Akuntabilitas kinerja dan keuangan baik sumber dana APBN/D maupun dana lainnya
10. *Root cause analysis* hambatan dan permasalahan
11. Analisis risiko *fraud* dan rekomendasi mitigasinya
12. Rekomendasi perbaikan kebijakan dan implementasi

C

PHTC PEMBANGUNAN RS LENGKAP BERKUALITAS



1. Analisis atas kecukupan dan keselarasan desain kebijakan intervensi kesehatan melalui Pembangunan RS Lengkap Berkualitas
2. Analisis koordinasi dan kelembagaan antar K/L/D terkait Pelaksanaan Pembangunan RS Lengkap Berkualitas
3. Analisis perencanaan, implementasi, dan akuntabilitas Pembangunan RS Lengkap Berkualitas:
 - Capaian pembangunan RS Lengkap Berkualitas dan Peningkatan akreditasi layanan kesehatan lanjutan kelas D menjadi kelas C
 - Analisis kesiapan atas pembangunan RS Lengkap Berkualitas (termasuk sarana dan prasarana, alkes, SDM Kesehatan hingga infrastruktur pendukung)
 - Akuntabilitas keuangan dan kinerja pembangunan RS Lengkap Berkualitas baik sumber dana pusat
 - Analisis kebermanfaatan sarpras, alkes, dan ketersediaan SDM Kesehatan
 - Analisis atas dampak mutu layanan kesehatan KJSU dan KIA
4. Analisis dampak Pembangunan RS Lengkap Berkualitas terhadap peningkatan layanan kesehatan
5. Analisis ketepatan dan kecukupan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Pembangunan RS Lengkap Berkualitas
6. Identifikasi *root cause* atas permasalahan/hambatan
7. Analisis Risiko *Fraud* dan rekomendasi mitigasinya
8. Rekomendasi perbaikan kebijakan dan implementasi





1. Analisis ketepatan dan keselarasan kebijakan pengentasan tuberkulosis (TBC) pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. Analisis ketepatan data penemuan kasus TBC
3. Analisis sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pengentasan TBC
4. Analisis perencanaan dan penganggaran pengentasan TBC
5. Analisis kecukupan penyediaan sarana prasarana, termasuk sarana pendukung surveilans, laboratorium serta vaksin dan obat untuk program pengentasan TBC
6. Analisis implementasi pengentasan TBC (Promotif, Preventif, dan Kuratif)
7. Analisis cakupan pengentasan TBC dan perluasan layanan melalui insentif fasyankes
8. Analisis efektivitas program pengentasan TBC
9. Analisis ketepatan dan kecukupan dukungan pemerintah daerah terhadap pengentasan TBC
10. *Root cause analysis* hambatan dan permasalahan
11. Analisis risiko *fraud* dan rekomendasi mitigasinya
12. Rekomendasi perbaikan kebijakan dan implementasi



1. Analisis kecukupan dan keselarasan kebijakan dan peraturan di level pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa terkait program pencegahan dan penurunan stunting (intervensi kesehatan, pangan, perlindungan sosial, infrastruktur dan pendidikan)
2. Analisis ketepatan data kasus stunting
3. Analisis tata kelola dan koordinasi kelembagaan lintas sektor (K/L/D dan Desa) program pencegahan dan penurunan
4. Analisis ketepatan perencanaan dan penganggaran program pencegahan dan penurunan stunting
5. Analisis ketepatan dan penggunaan data keluarga risiko stunting dalam intervensi program pencegahan dan penurunan stunting
6. Analisis peningkatan kapasitas pengelola pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (P3S) (Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), kader posyandu, Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (TPK), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku lainnya).
7. Analisis implementasi intervensi spesifik dan sensitif program pencegahan dan penurunan stunting berdasarkan kelompok sasaran
8. Analisis kecukupan mekanisme monitoring dan ketepatan data pengukuran capaian program.
9. Analisis ketepatan dan kecukupan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan penurunan prevalensi stunting
10. Identifikasi *root cause* permasalahan berbagai intervensi program pencegahan dan penurunan stunting
11. Analisis risiko *fraud* dan rekomendasi mitigasinya
12. Rekomendasi perbaikan kebijakan maupun implementasi



- **KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**





KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Potret kesejahteraan
terutama masyarakat
miskin dan menengah

Analisis atas strategi dan
implementasi program
pengentasan kemiskinan
dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat

Hambatan dan
permasalahan

Rekomendasi
perbaikan

SIMPULAN TINGKAT SEKTOR INI
DIBANGUN DARI SIMPULAN ANTARA
PADA 2 TEMA DI DALAMNYA





TEMA 1.
**PENGENTASAN
KEMISKINAN**



TEMA 2.
**PEMBERDAYAAN EKONOMI
BERBASIS MASYARAKAT**



PENGENTASAN KEMISKINAN

SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 4 TOPIK DI DALAMNYA

1. Gambaran terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi masyarakat miskin dan rentan miskin
2. Analisis atas strategi kebijakan pengentasan kemiskinan
3. Analisis atas kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi untuk pengentasan kemiskinan
4. Efektivitas upaya pengentasan kemiskinan
5. Hambatan dan permasalahan dalam pengentasan kemiskinan
6. Rekomendasi perbaikan

A

TATA KELOLA DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL (DTSEN)



1. Analisis atas ketepatan, kecukupan dan keselarasan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan DTSEN, termasuk mekanisme bagi pakai
2. Analisis atas kualitas dan ketepatan data DTSEN
3. Analisis penjaminan kualitas basis data yang terintegrasi DTSEN
4. Analisis keamanan, akses, dan privasi data bagi pakai DTSEN
5. Analisis pemutakhiran basis data DTSEN
6. Akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan DTSEN
7. Analisis efektivitas penggunaan dan pemanfaatan DTSEN dalam mendorong pengentasan kemiskinan
8. Analisis ketepatan dan kecukupan dukungan pemerintah daerah terhadap pemutakhiran, pengelolaan, dan pemanfaatan DTSEN
9. Identifikasi root cause permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan DTSEN
10. Rekomendasi perbaikan kebijakan dan implementasi pemanfaatan DTSEN

B

PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI PENGURANGAN BEBAN DAN PENINGKATAN PENDAPATAN (KARTU KESEJAHTERAAN DAN KARTU USAHA AFIRMATIF)



1. Potret cakupan masyarakat miskin (Desil 1-4) yang mendapat intervensi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif
2. Analisis ketepatan, kecukupan dan keselarasan kebijakan skema Perlindungan Sosial melalui Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif pada K/L/D
3. Analisis koordinasi dan kelembagaan lintas sektor dalam skema Perlindungan Sosial
4. Analisis kesesuaian implementasi serta ketepatan sasaran Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif
5. Analisis ketepatan dan interoperabilitas sistem data antar program melalui pemanfaatan DTSEN
6. Analisis atas kemampuan, keberlanjutan serta inovasi skema pendanaan (burden sharing K/L/D/Mitra Pembangunan) Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif
7. Identifikasi root cause permasalahan dan hambatan
8. Analisis risiko fraud dan rekomendasi mitigasinya
9. Rekomendasi perbaikan kebijakan dan implementasi

C

PENURUNAN JUMLAH KANTONG KEMISKINAN



1. Potret kondisi layanan dasar di wilayah kantong kemiskinan (fasilitas kesehatan, pendidikan, sanitasi dan air minum layak, rumah layak huni, akses listrik, gas dan internet serta jalan dan transportasi)
2. Analisis keberadaan dan ketepatan data infrastruktur layanan dasar
3. Analisis ketepatan, kecukupan dan keselarasan kebijakan penurunan kantong kemiskinan pada K/L/D, terkait:
 - a. Penetapan kantong wilayah kemiskinan
 - b. Identifikasi kebutuhan layanan dasar di wilayah kantong kemiskinan
 - c. Prioritas wilayah kantong kemiskinan mendapatkan intervensi peningkatan akses layanan dasar
 - d. Konvergensi program terkait pemenuhan layanan dasar (fasilitas kesehatan, pendidikan, sanitasi dan air minum layak, rumah layak huni, akses listrik, gas dan internet serta jalan dan transportasi)
 - e. Kebutuhan infrastruktur pendukung untuk memastikan aksesibilitas bagi masyarakat miskin
 - f. Pemanfaatan dan pemeliharaan akses layanan dasar
4. Analisis sinergi, koordinasi dan kelembagaan lintas sektor antar K/L/D/Badan Usaha
5. Analisis ketepatan dan kesesuaian intervensi penurunan kantong kemiskinan meliputi:
 - a. Fasilitas kesehatan
 - b. Pendidikan
 - c. Sanitasi dan air minum layak
 - d. Rumah layak huni
 - e. Akses listrik, gas dan internet
 - f. Jalan dan transportasi
6. Analisis atas inklusivitas layanan dasar untuk diakses seluruh masyarakat
7. Analisis atas aksesibilitas intervensi penurunan kantong kemiskinan untuk dijangkau masyarakat miskin, baik yang telah ada (*existing*) maupun yang akan dibangun
8. Analisis atas evaluasi dan monitoring atas kebermanfaatan program/intervensi penurunan kantong kemiskinan
9. Identifikasi *root cause*
10. Analisis risiko *fraud* dan rekomendasi mitigasinya
11. Rekomendasi perbaikan kebijakan

D

PHTC SEKOLAH RAKYAT



1. Potret progres pembangunan Sekolah Rakyat
2. Analisis ketepatan data calon siswa
3. Analisis keselarasan, ketepatan dan kecukupan kebijakan yang disusun oleh K/L/D
4. Analisis kesiapan dan akuntabilitas pembentukan Sekolah Rakyat meliputi:
 - a. Sarana prasarana
 - b. Penerimaan calon siswa
 - c. Penerimaan guru dan tenaga kependidikan
 - d. Kurikulum
 - e. Kegiatan Belajar Mengajar
5. Analisis keterlibatan dan komitmen K/L/D dalam penyediaan sarana prasarana, penerimaan calon siswa, penerimaan guru dan tenaga pendidik dan Kurikulum serta Kegiatan Belajar Mengajar
6. Analisis efektivitas Program Sekolah Rakyat
7. Analisis ketepatan dan kecukupan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan SR
8. Analisis risiko dan rekomendasi mitigasi
9. Identifikasi *root cause* permasalahan
10. Analisis risiko *fraud* dan rekomendasi mitigasinya
11. Rekomendasi Perbaikan



PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS MASYARAKAT



SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 3 TOPIK DI DALAMNYA

1. Analisis atas kebijakan dan implementasi program pemberdayaan masyarakat
2. Analisis dampak pemberdayaan melalui Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) terhadap kemandirian ekonomi masyarakat
3. Hambatan dan permasalahan
4. Rekomendasi perbaikan

A

TOPIK PHTC TATA KELOLA KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH



1. Potret capaian pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) (jumlah, jenis, dan sebaran).
2. Potret operasionalisasi dan Keberlangsungan usaha KDMP
3. Analisis ketepatan, keselarasan dan kecukupan kebijakan Tata Kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Analisis koordinasi dan kelembagaan lintas sektor pengelolaan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih
5. Analisis keandalan data koperasi
6. Analisis implementasi dan kualitas pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, minimal mencakup program/kegiatan:
 - a. Kemitraan KDMP
 - b. Ekosistem Jaringan Usaha KDMP
 - c. Akses permodalan KDMP
 - d. Produksi KDMP
 - e. Kapasitas Pengembangan Ekonomi Berbasis Hilirisasi Komoditas Produk Unggulan Desa
 - f. Kompetensi SDM KDMP
 - g. Keterkaitan dengan program pemerintah lainnya

1. Analisis akuntabilitas bantuan berupa uang maupun barang untuk pembangunan KDKMP
2. Analisis efektivitas dan dampak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam mendorong kemandirian masyarakat
3. Analisis ketepatan dan kecukupan dukungan pemerintah daerah terhadap efektivitas pembentukan KDKMP
4. Hambatan dan Permasalahan (*Root Cause Analysis*)
5. Analisis risiko *fraud* dan rekomendasi mitigasinya
6. Rekomendasi perbaikan Kebijakan/ implementasi



B

TATA KELOLA PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN BAGI UMKM



1. Analisis ketepatan, kecukupan, keselarasan bauran kebijakan K/L/D dalam peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM
2. Analisis koordinasi dan kelembagaan lintas sektor dalam peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM
3. Analisis keandalan basis data tunggal UMKM
4. Analisis implementasi peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM (KUR, UMI, Mekar dsbnya)
 - Pemetaan jenis, kapasitas, dan karakter sasaran dari seluruh fasilitas pembiayaan bagi UMKM
 - Coverage UMKM yang dapat akses pembiayaan
 - Kinerja penyaluran pembiayaan bagi UMKM (termasuk non-performing loan/NPL)
 - Kemudahan mengakses program pembiayaan bagi UMKM
 - Ketepatan maupun perluasan target sasaran program pembiayaan bagi UMKM
 - Akuntabilitas keuangan penyaluran KUR
 - Penguatan peran perbankan dan lembaga keuangan
 - Sustainability program pembiayaan (pemerintah dan lembaga penyalur)
5. Analisis efektivitas dan dampak program pembiayaan terhadap peningkatan produktivitas UMKM
6. Progres, mekanisme penyaluran dan ketepatan data penerima Kartu Usaha Produktif
7. Hambatan dan Permasalahan (Root Cause Analysis)
8. Analisis risiko *fraud* dan rekomendasi mitigasinya
9. Rekomendasi Perbaikan

C

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF NASIONAL



1. Analisis ketepatan, kecukupan, dan keselarasan bauran kebijakan K/L/D dalam pengembangan ekonomi kreatif
2. Analisis sinergi dan koordinasi K/L/D/BU dalam pengembangan ekonomi kreatif
3. Analisis keandalan data pelaku ekonomi
4. Analisis akuntabilitas dan tata kelola implementasi pengembangan ekonomi kreatif, yang minimal mencakup:
 - a. Peningkatan ekspor produk kreatif
 - b. Pengembangan SDM ekonomi kreatif
 - c. Aktivitas pemasaran dalam perluasan dan peningkatan pangsa pasar
 - d. Integrasi data ekonomi kreatif
 - e. Pengembangan ekosistem kekayaan intelektual
5. Analisis efektivitas dan dampak pengembangan ekonomi kreatif mendorong ekonomi berbasis masyarakat
6. Identifikasi hambatan dan permasalahan
7. Analisis risiko *fraud* dan rekomendasi mitigasinya
8. Rekomendasi Perbaikan



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

The background of the slide is a photograph of a construction site. It shows several large, grey concrete bridge piers and spans. Orange metal scaffolding and support structures are visible around the concrete elements. A large, semi-transparent red letter 'C' is overlaid on the lower half of the image. In the top right corner, there is a solid blue rectangular block.

● **PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
BERKUALITAS**



PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS

Gambaran
pembangunan
infrastruktur nasional

Analisis atas keselarasan
kebijakan pemerintah pusat
dan daerah

Implementasi kebijakan
penyediaan infrastruktur
secara nasional dan
regional

Permasalahan/hambat
an penyediaan
infrastruktur yang
berkualitas

SIMPULAN TINGKAT SEKTOR INI
DIBANGUN DARI SIMPULAN ANTARA
PADA 2 TEMA DI DALAMNYA





TEMA 1.

**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KONEKTIVITAS**



TEMA 2.

**PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
LAYANAN DASAR YANG
BERKUALITAS**



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS

**SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI
HASIL PENGAWASAN PADA 4 TOPIK DI DALAMNYA**

1. Potret pembangunan infrastruktur konektivitas, mencakup:
 - a. Pemetaan target dan progres pembangunan infrastruktur konektivitas tahun 2026.
 - b. Kondisi infrastruktur konektivitas yang telah terbangun s.d. tahun 2025, termasuk efektivitas utilitasnya dalam mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan industri, aksesibilitas ke wilayah kantong kemiskinan, dan pembangunan perkotaan berkelanjutan.
2. Simpulan analisis atas ketepatan perencanaan dan kebutuhan pembangunan infrastruktur konektivitas;
3. Simpulan akuntabilitas keuangan;
4. Simpulan efektivitas peran dan koordinasi kelembagaan (pemerintah, badan usaha, swasta);
5. Permasalahan/hambatan yang perlu segera ditangani;
6. Rekomendasi perbaikan.

A

INFRASTRUKTUR JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN (TERMASUK JALAN TOL)



1. Potret pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan lingkup nasional dan regional, meliputi:
 - a. Pemetaan target dan progres pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan tahun 2026.
 - b. Kondisi infrastruktur jaringan jalan dan jembatan yang telah terbangun s.d. tahun 2025, termasuk efektivitas utilitasnya dalam mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan industri, aksesibilitas ke wilayah kantong kemiskinan, dan pembangunan perkotaan berkelanjutan.
2. Analisis atas kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) terkait pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan;
3. Analisis atas sumber dan skema pendanaan pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan;
4. Akuntabilitas keuangan pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan;
5. Efektivitas peran Badan Usaha dalam perusahaan jalan tol;
6. Identifikasi dan analisis akar permasalahan pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan;
7. Rekomendasi perbaikan tata kelola dan kebijakan.

B

INFRASTRUKTUR PELABUHAN



1. Potret pembangunan infrastruktur pelabuhan lingkup nasional dan regional, mencakup:
 - a. Pemetaan target dan progres pembangunan infrastruktur pelabuhan tahun 2026.
 - b. Kondisi infrastruktur pelabuhan yang telah terbangun s.d. tahun 2025, termasuk efektivitas utilitasnya dalam mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan industri, konektivitas antar wilayah, dan aktivitas perdagangan (ekspor-impor), termasuk distribusi barang dan logistik;
2. Analisis atas kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) terkait pembangunan infrastruktur pelabuhan;
3. Analisis atas sumber dan skema pendanaan pembangunan infrastruktur pelabuhan;
4. Akuntabilitas keuangan pembangunan infrastruktur pelabuhan;
5. Efektivitas peran Badan Usaha dalam perusahaan jasa pelabuhan;
6. Identifikasi dan analisis akar permasalahan pembangunan infrastruktur pelabuhan;
7. Rekomendasi perbaikan tata kelola dan kebijakan.

C

INFRASTRUKTUR
BANDARA

1. Potret pembangunan infrastruktur bandara lingkup nasional dan regional, meliputi:
 - a. Pemetaan target dan progres pembangunan infrastruktur bandara tahun 2026.
 - b. Kondisi infrastruktur bandara yang telah terbangun s.d. tahun 2025, termasuk efektivitas utilitasnya dalam mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan industri, konektivitas antar wilayah, dan distribusi barang dan logistik;
2. Analisis atas kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) terkait pembangunan infrastruktur bandara;
3. Analisis atas sumber dan skema pendanaan pembangunan infrastruktur bandara;
4. Akuntabilitas keuangan pembangunan infrastruktur bandara;
5. Efektivitas peran Badan Usaha dalam perusahaan bandara;
6. Identifikasi dan analisis akar permasalahan pembangunan infrastruktur bandara;
7. Rekomendasi perbaikan tata kelola dan kebijakan.

D

INFRASTRUKTUR
PERKERETAAPIAN

1. Potret pembangunan infrastruktur perkeretaapian lingkup nasional dan regional, meliputi:
 - a. Pemetaan target dan progres pembangunan infrastruktur perkeretaapian tahun 2026.
 - b. Kondisi infrastruktur perkeretaapian yang telah terbangun s.d. tahun 2025, termasuk efektivitas utilitasnya dalam mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan industri, distribusi barang dan logistik, dan pengembangan perkotaan berkelanjutan (termasuk pengurangan tingkat kemacetan);
2. Analisis atas kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) terkait pembangunan infrastruktur perkeretaapian;
3. Analisis atas sumber dan skema pendanaan pembangunan infrastruktur perkeretaapian;
4. Akuntabilitas keuangan pembangunan infrastruktur perkeretaapian;
5. Efektivitas peran Badan Usaha dalam perusahaan perkeretaapian;
6. Identifikasi dan analisis akar permasalahan pembangunan infrastruktur perkeretaapian;
7. Rekomendasi perbaikan tata kelola dan kebijakan.



PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR YANG BERKUALITAS



SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 3 TOPIK DI DALAMNYA

1. Simpulan analisis atas gap penyediaan infrastruktur layanan dasar;
2. Simpulan analisis atas ketepatan perencanaan dan kebutuhan pembangunan infrastruktur layanan dasar;
3. Simpulan akuntabilitas keuangan dan kinerja;
4. Simpulan potret utilisasi infrastruktur layanan dasar yang telah dibangun;
5. Permasalahan/hambatan yang perlu segera ditangani;
6. Rekomendasi perbaikan.

A

PENYEDIAAN PERUMAHAN RAKYAT YANG LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU (TERMASUK PROGRAM PENYEDIAAN 3 JUTA RUMAH)



1. Potret pembangunan perumahan rakyat secara nasional dan regional, meliputi:
 - a. Kebutuhan dan ketersediaan (*backlog*) perumahan rakyat s.d. tahun 2026.
 - b. Pemetaan target dan progres pembangunan perumahan rakyat tahun 2026.
 - c. Kondisi utilitas perumahan rakyat yang telah terbangun s.d. tahun 2025.
2. Analisis atas kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) terkait penyediaan perumahan rakyat;
3. Analisis atas sumber dan skema pendanaan penyediaan perumahan rakyat, termasuk analisis risiko pendanaan;
4. Akuntabilitas keuangan program penyediaan perumahan rakyat;
5. Potret pemenuhan layanan dasar (sanitasi, listrik, air bersih, jaringan gas, dll.) pada perumahan rakyat yang dibangun;
6. Analisis efektivitas penyediaan perumahan rakyat terkait penurunan kawasan kumuh;
7. Efektivitas peran Badan Usaha dalam peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap perumahan rakyat;
8. Identifikasi dan analisis akar permasalahan penyediaan perumahan rakyat;
9. Rekomendasi perbaikan tata kelola dan kebijakan.

B

PENYEDIAAN AIR BAKU (JARINGAN IRIGASI) DAN AIR MINUM (SPAM) YANG LAYAK DAN BERKUALITAS



1. Potret pembangunan infrastruktur air bersih dan air baku secara nasional dan regional, meliputi:
 - a. Kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur air bersih dan air baku s.d. tahun 2026.
 - b. Pemetaan target dan progres pembangunan infrastruktur air bersih dan air baku tahun 2026.
 - c. Kondisi utilisasi infrastruktur air bersih dan air baku yang telah terbangun s.d. tahun 2025, termasuk efektivitas utilitasnya dalam mendukung peningkatan produksi pangan (jaringan irigasi) dan intervensi ke kantong kemiskinan;
2. Analisis atas kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) terkait pembangunan infrastruktur air bersih dan air baku;
3. Analisis atas sumber dan skema pendanaan pembangunan infrastruktur air bersih dan air baku, termasuk analisis risiko pendanaan;
4. Akuntabilitas keuangan pembangunan infrastruktur air bersih dan air baku;
5. Efektivitas peran Badan Usaha dalam peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih dan air baku;
6. Identifikasi dan analisis akar permasalahan penyediaan air bersih dan air baku;
7. Rekomendasi perbaikan tata kelola dan kebijakan.





1 Potret pengelolaan sampah lingkup nasional dan regional, meliputi:

- Pemetaan target dan progres penanganan sampah tahun 2026.
- Capaian pengurangan dan penanganan sampah s.d. tahun 2025.
- kondisi utilisasi sarana/prasarana, antara lain fasilitas pemilahan sampah, kendaraan pengangkut sampah, Bank Sampah, Tempat Pengelolaan Sampah (TPS)/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)/Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampai dengan tahun 2025;
- Pengelolaan anggaran
- Pengelolaan SDM, termasuk beban pengelolaan sampah terhadap jumlah operator lapangan.

2 Analisis atas kecukupan dan keselarasan kebijakan pengelolaan sampah Pusat dan Daerah (Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada)

3 Efektivitas peran dan koordinasi kelembagaan pengelolaan sampah baik pusat dan daerah

4 Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah pusat dan daerah (kesesuaian implementasi kebijakan pengelolaan sampah pengurangan dan penanganan sampah utamanya program/kegiatan yang tercantum dalam RPJMN yang diturunkan ke dalam Renstra dan RPJMD untuk kegiatan periode 2025 s.d pelaksanaan evaluasi Triwulan 2 2026

5 Analisis atas dampak negatif sampah yang tidak terkelola (beban ekonomi) dan potensi ekonomi pengelolaan sampah/ekonomi sirkular;

a. beban ekonomi: pencemaran, risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, bencana, kompensasi kepada masyarakat terdampak; dan

b. potensi ekonomi/ekonomi sirkular: listrik/PSEL, biogas, kompos, produk kerajinan, bank sampah.

6 Identifikasi dan analisis akar permasalahan (root cause analysis) pengelolaan sampah.

7 Rekomendasi perbaikan tata kelola dan kebijakan



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN



- **AKUNTABILITAS
KEUANGAN PEMERINTAH DAN
KEKAYAAN NEGARA/DAERAH
YANG DIPISAHKAN**





AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAN KEKAYAAN NEGARA/DAERAH YANG DIPISAHKAN

Potret dan proyeksi postur
APBN/Daerah/Desa TA 2026

Analisis kualitas perencanaan dan
penganggaran pemerintah

Potret permasalahan pengelolaan:

- a. risiko fiskal;
- b. pendapatan pemerintah;
- c. belanja pemerintah, termasuk Transfer ke Daerah (TKD);
- d. pembiayaan pemerintah;
- e. kekayaan negara/daerah yang dipisahkan (dalam konteks kontribusinya terhadap keuangan negara/daerah, pelayanan publik, serta pembangunan nasional);
- f. Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (dalam konteks kontribusinya terhadap keuangan negara/daerah, pelayanan publik, serta pembangunan nasional);

Potret pola permasalahan pengelolaan
fiskal pemerintah, serta pemetaan titik
kritis dan permasalahan pada desain dan
implementasi kebijakan yang
mempengaruhi kinerja pengelolaan
fiskal pemerintah

Rekomendasi perbaikan

SIMPULAN TINGKAT SEKTOR INI
DIBANGUN DARI SIMPULAN ANTARA
PADA 3 TEMA DI DALAMNYA





TEMA 1.

**AKUNTABILITAS KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT**



TEMA 2.

**AKUNTABILITAS
KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH/DESA**



TEMA 3.

**AKUNTABILITAS KEUANGAN
NEGARA/DAERAH YANG
DIPISAHKAN**



AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

BAGIAN 1



SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 8 TOPIK DI DALAMNYA

- Analisis postur dan proyeksi APBN 2026, termasuk ketepatan asumsi makro dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.
- Analisis kualitas kebijakan dan kinerja pendapatan pemerintah pusat, termasuk efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan evaluasi *tax expenditure*.
- Analisis kualitas belanja pemerintah pusat (efisiensi alokatif, disiplin eksekusi, ketepatan waktu penyerapan, dan efektivitas PBJ), termasuk *spending review* sektoral pada sektor prioritas nasional.
- Analisis kualitas pembiayaan pemerintah pusat, mencakup pembiayaan utang (profil risiko, *sustainability*, dan strategi pengelolaan) serta pembiayaan inovatif/non-utang.
- Analisis kesinambungan fiskal pemerintah pusat, termasuk rasio fiskal kunci dan proyeksi risiko jangka menengah.
- Analisis kualitas desain dan efektivitas pengelolaan risiko fiskal pemerintah pusat.
- Rekomendasi perbaikan.

A

OPTIMALISASI PENERIMAAN PERPAJAKAN



1. Analisis kinerja dan proyeksi penerimaan perpajakan.
2. Analisis ketepatan, kecukupan, dan keselarasan kebijakan strategis dan teknis perpajakan, meliputi:
 - a. kualitas strategi kebijakan;
 - b. kualitas penetapan dan *cascading target* kinerja;
 - c. penggalian potensi melalui *sectoral mapping* dan integrasi data lintas instansi;
 - d. kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM dalam mendukung reformasi dan kinerja perpajakan.
3. Analisis efektivitas implementasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, meliputi:
 - a. optimalisasi/pelebaran basis pemajakan;
 - b. interoperabilitas Coretax, CEISA, dan sistem administrasi perpajakan lainnya;
 - c. *joint program* dalam peningkatan kepatuhan WP (Wajib Pajak), serta efektivitas pengawasan, pencegahan dan pemberantasan (bea dan cukai).
4. Analisis efektivitas pengelolaan piutang perpajakan, termasuk *aging analysis*, strategi *risk-based collection*, dan potensi *write-off*.
5. Analisis efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan pengelolaan risiko fiskal (termasuk risiko *fraud*) terkait penerimaan perpajakan.
6. *Root cause analysis* hambatan dan permasalahan dalam optimalisasi penerimaan perpajakan.
7. Rekomendasi perbaikan.



B**OPTIMALISASI
PNBP**

1. Analisis kinerja dan proyeksi penerimaan PNBP, termasuk *sustainability*, tren per jenis, dan *benchmarking* internasional untuk sektor tertentu.
2. Analisis ketepatan, kecukupan, dan keselarasan kebijakan strategis dan teknis PNBP, meliputi:
 - a. kualitas strategi kebijakan;
 - b. kualitas strategi teknis operasional;
 - c. efektivitas kelembagaan dan koordinasi antar K/L.
3. Analisis efektivitas pelaksanaan dan pengawasan optimalisasi PNBP pada sektor migas, minerba, kehutanan, dan kelautan-perikanan, meliputi akurasi pengukuran produksi, kepatuhan pelaporan/pembayaran, dan integrasi isu lingkungan.
4. Analisis kinerja penerimaan PNBP dari Pemulihan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi, termasuk *recovery rate*, *time lag*, dan efektivitas koordinasi lintas lembaga.
5. Analisis efektivitas pengelolaan piutang PNBP, mencakup *aging analysis*, kolektabilitas, dan strategi penagihan berbasis risiko.
6. Analisis efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan pengelolaan risiko fiskal (termasuk risiko *fraud*) terkait penerimaan PNBP.
7. *Root cause analysis* hambatan dan permasalahan dalam optimalisasi penerimaan PNBP.
8. Rekomendasi perbaikan.

C**TATA KELOLA
PERTAMBANGAN DALAM
KAWASAN HUTAN**

1. Potret pertambangan dalam kawasan hutan.
2. Analisis kepatuhan izin pertambangan dalam kawasan hutan, termasuk kepatuhan izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH) dan pembayaran PNBP terkait.
3. Analisis potensi penerimaan negara dan kerugian negara atas aktivitas tambang dalam kawasan hutan tanpa izin, termasuk estimasi potensi denda/sanksi administratif.
4. Identifikasi risiko *fraud* sektor pertambangan dalam kawasan hutan.
5. Rekomendasi perbaikan.

D**TATA KELOLA
PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DALAM
KAWASAN HUTAN**

1. Potret perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan.
2. Analisis kepatuhan izin perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, termasuk kepatuhan terhadap kewajiban PNBP dan pembayaran pungutan.
3. Analisis potensi penerimaan negara dan kerugian negara atas aktivitas perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan tanpa izin, termasuk estimasi potensi denda/sanksi administratif.
4. Identifikasi risiko *fraud* sektor perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan.
5. Rekomendasi perbaikan.



AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

BAGIAN 2



SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 8 TOPIK DI DALAMNYA

- Analisis postur dan proyeksi APBN 2026, termasuk ketepatan asumsi makro dan keselarasan dengan RPJMN 2025–2029.
- Analisis kualitas kebijakan dan kinerja pendapatan pemerintah pusat, termasuk efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi PNB, dan evaluasi *tax expenditure*.
- Analisis kualitas belanja pemerintah pusat (efisiensi alokatif, disiplin eksekusi, ketepatan waktu penyerapan, dan efektivitas PBJ), termasuk *spending review* sektoral pada sektor prioritas nasional.
- Analisis kualitas pembiayaan pemerintah pusat, mencakup pembiayaan utang (profil risiko, dan strategi pengelolaan) serta pembiayaan inovatif/non-utang.
- Analisis kesinambungan fiskal pemerintah pusat, termasuk rasio fiskal kunci dan proyeksi risiko jangka menengah.
- Analisis kualitas desain dan efektivitas pengelolaan risiko fiskal pemerintah pusat.
- Rekomendasi perbaikan.

E

EFEKTIVITAS BELANJA PERPAJAKAN



1. Analisis kinerja *tax expenditure*, meliputi tren nilai, proporsinya terhadap PDB dan penerimaan pajak, distribusi berdasarkan jenis pajak dan tujuan, serta dampaknya terhadap indikator ekonomi strategis, dilengkapi *international benchmarking*.
2. Analisis ketepatan pemberian fasilitas perpajakan, termasuk *cost-benefit analysis*, kesesuaian sasaran dengan prioritas pembangunan, dan evaluasi potensi *leakage* atau penyalahgunaan.
3. Identifikasi risiko dan hambatan implementasi kebijakan *tax expenditure*, meliputi risiko *moral hazard*, kelemahan sistem administrasi, hambatan regulatif, kesenjangan koordinasi antar instansi, serta risiko/hambatan lain yang signifikan.
4. Rekomendasi perbaikan.

F

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EFISIENSI ALOKATIF BELANJA PEMERINTAH PUSAT



1. Potret perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dengan fokus pada PHTC dan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (PPP), termasuk tren alokasi dan realisasi, kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional, serta peta K/L terkait.
2. Analisis kualitas desain intervensi pemerintah (*logic model* intervensi).
3. Analisis kualitas konvergensi perencanaan pembangunan antara prioritas nasional dengan K/L/D, termasuk tingkat keselarasan target, indikator, dan sinergi/koherensi program.
4. Analisis kualitas pengalokasian anggaran.
5. Analisis potensi efektivitas dan efisiensi dari sisi perencanaan dan penganggaran.
6. Analisis potensi ketercapaian tujuan pembangunan sektoral.
7. *Root cause analysis* hambatan dan permasalahan perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat.
8. Rekomendasi perbaikan.




Triwulan II:

1. Analisis kecukupan, ketepatan, dan keselarasan kebijakan PBJ pemerintah pusat terhadap percepatan belanja dan *procurement for value*.
2. Potret rencana dan realisasi belanja pemerintah pusat beserta proporsi PBJ, termasuk *variance analysis*.
3. Analisis akuntabilitas pelaksanaan PBJ.
4. Analisis efisiensi dan efektivitas PBJ, termasuk dan tidak terbatas pada *procurement cycle time*, *cost saving*, dan kualitas *output*.
5. Analisis risiko PBJ, termasuk risiko *fraud*.
6. Analisis hambatan dan permasalahan tata kelola PBJ.
7. Rekomendasi perbaikan.

Triwulan IV:

1. Analisis postur dan realisasi belanja pemerintah pusat, termasuk PBJ.
2. Analisis keandalan rencana belanja (deviasi Rencana Penggunaan Dana/RPD awal dibandingkan dengan revisi) dan penyebabnya.
3. Analisis peran PBJ dalam mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan.
4. Analisis disiplin belanja K/L, termasuk frekuensi revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT).
5. Analisis pengelolaan risiko fiskal dalam pelaksanaan anggaran.
6. Analisis kualitas manajemen kas pemerintah pusat.
7. Analisis efektivitas belanja pemerintah untuk sektor yang menjadi fokus APBN 2026.
8. Analisis kualitas rencana kebutuhan belanja & sumber pendapatan untuk tahun berikutnya.
9. Analisis hambatan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat.
10. Rekomendasi perbaikan.



1. Analisis kebijakan dan tata kelola pengelolaan utang pemerintah, termasuk keselarasan dengan strategi fiskal pemerintah jangka menengah.
2. Potret dan profil utang pemerintah serta dampaknya terhadap ruang fiskal, termasuk klasifikasi instrumen, tren rasio utang kunci, *interest-to-revenue ratio*, dan analisis beban bunga terhadap kapasitas fiskal.
3. Analisis ketepatan dan kecukupan strategi pengelolaan utang, dilengkapi *scenario analysis* dan kesesuaian dengan dinamika pasar global.
4. Analisis implementasi dan kinerja portofolio utang pemerintah, termasuk analisis komparatif, benchmark internasional, efektivitas diversifikasi instrumen, potret kendala/permasalahan, dan *root cause analysis*.
5. Analisis efektivitas pengelolaan risiko utang pemerintah, termasuk risiko suku bunga, nilai tukar, *refinancing*, pasar, serta evaluasi penggunaan instrumen lindung nilai.
6. Rekomendasi perbaikan.

AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH/DESA

BAGIAN 1



SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 8 TOPIK DI DALAMNYA

- Analisis disiplin dan efektivitas belanja, termasuk ketepatan waktu, kesesuaian peruntukan, *front-loading/year-end rush*, *value for money*, serta keterkaitan belanja dengan *output-outcome* prioritas.
- Analisis tata kelola pengadaan barang/jasa dan pengelolaan aset, meliputi efisiensi, transparansi, penerapan e-procurement/tender dini, serta pengelolaan risiko PBJ dan aset daerah/desa.
- Evaluasi efektivitas transfer fiskal (Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus Aceh dan Papua) dan Dana Desa, termasuk ketepatan alokasi, penyaluran, penggunaan, serta dampak terhadap capaian prioritas nasional dan lokal.
- Identifikasi hambatan utama (*root cause*) pengelolaan keuangan daerah/desa, termasuk aspek regulasi, kelembagaan, SDM, teknologi, dan koordinasi lintas pihak.
- Rekomendasi strategis dan operasional untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya fiskal daerah/desa guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

A

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



1. Analisis potret PAD, meliputi:
 - a. analisis potensi PAD yang belum dioptimalkan (jenis, tarif, dan/atau basis);
 - b. analisis ketepatan penetapan target PAD (dibandingkan terhadap potensi);
 - c. Analisis efektivitas penagihan PAD
 - d. Peta sebaran sektoral (jenis pajak/retribusi) dan regional antar daerah.
 - e. Tren kuantitatif (target vs realisasi, rasio pertumbuhan, perbandingan dengan *benchmark* daerah sejenis);
 - f. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dan ruang fiskal.
2. Analisis kebijakan dan kelembagaan terkait PAD, termasuk:
 - a. keselarasan regulasi dan kebijakan daerah dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan turunannya.
 - b. Kapasitas kelembagaan dan SDM, termasuk beban kerja dan kompetensi teknis.
 - c. Kualitas basis data, integrasi sistem informasi, dan adopsi teknologi.
3. Potret permasalahan dan *root cause analysis* pengelolaan PAD, meliputi:
 - a. Hambatan pada level kebijakan, kelembagaan, dan operasional.
 - b. Analisis *gap* antara target dan realisasi, serta antara potensi dengan realisasi.
 - c. Analisis penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak/retribusi.
4. *Lessons learned* dari analisis titik kritis optimalisasi PAD
5. Praktik baik dari daerah dengan kinerja PAD tinggi.
6. Analisis efektivitas pengelolaan risiko PAD, termasuk risiko keuangan, risiko operasional, risiko regulasi, dan risiko *fraud*, serta efektivitas mitigasinya.
7. Analisis penyempurnaan strategi pengelolaan PAD, antara lain: diversifikasi sumber PAD, perluasan basis pemajakan, dan penyesuaian tarif, serta peningkatan tata kelola.
8. Rekomendasi perbaikan.



1. Potret Perencanaan dan Penganggaran Daerah, meliputi:
 - a. Sebaran parameter perencanaan dan komposisi belanja APBD, termasuk pemetaan dukungan terhadap pelaksanaan PHTC.
 - b. Tren kuantitatif, termasuk proporsi belanja modal, belanja operasional, dan belanja sosial.
 - c. Tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan (RPJMD/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)) dengan APBD.
2. Analisis kualitas sasaran utama daerah terhadap prioritas nasional, termasuk keselarasan tujuan pembangunan daerah dengan strategi kebijakan fiskal kewilayahan TA 2026, analisis sektoral pada sektor prioritas, pengukuran kontribusi sasaran daerah terhadap target indikator makro dan sektoral nasional.
3. Analisis kualitas desain intervensi pemerintah daerah (*logic model* intervensi), konsistensi/keselarasan indikator kinerja antar dokumen perencanaan dan penganggaran, kelayakan desain intervensi dari aspek data/urgensi dan potensi dampak.
4. Analisis potensi efektivitas dan efisiensi intervensi daerah.
5. *Root cause analysis* hambatan dan permasalahan perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
 - a. Hambatan regulasi, koordinasi lintas perangkat daerah, dan kapasitas SDM.
 - b. Keterbatasan data dan analitik dalam penyusunan target dan alokasi anggaran.
 - c. Pola revisi anggaran yang mengindikasikan lemahnya perencanaan awal.
6. Analisis risiko dan tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk risiko fiskal, risiko kinerja, serta mekanisme pengendalian internal dan mitigasi risiko.
7. Rekomendasi perbaikan, termasuk strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah.



AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH/DESA

BAGIAN 2



SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 8 TOPIK DI DALAMNYA

- Analisis kinerja dan posisi keuangan daerah/desa, meliputi sumber pendapatan (PAD, TKD, Dana Otsus, pendapatan desa), struktur belanja, pembiayaan, dan implikasinya terhadap ruang fiskal, kemandirian, dan keberlanjutan.
- Simpulan keselarasan kebijakan, regulasi, dan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah/desa dengan tujuan pembangunan (RPJMN, RPJMD, UU HKPD), termasuk efektivitas perencanaan, penganggaran, dan desain intervensi program.
- Analisis disiplin dan efektivitas belanja, termasuk ketepatan waktu, kesesuaian peruntukan, *front-loading/year-end rush*, *value for money*, serta keterkaitan belanja dengan *output-outcome* prioritas.
- Analisis tata kelola pengadaan barang/jasa dan pengelolaan aset, mencakup efisiensi, transparansi, penerapan e-procurement/tender dini, serta pengelolaan risiko PBJ dan aset daerah/desa.
- Evaluasi efektivitas transfer fiskal (DAU, DAK, DBH, Dana Otsus Aceh dan Papua) dan Dana Desa, termasuk ketepatan alokasi, penyaluran, penggunaan, serta dampak terhadap capaian prioritas nasional dan lokal.
- Identifikasi hambatan utama (*root cause*) pengelolaan keuangan daerah/desa, termasuk aspek regulasi, kelembagaan, SDM, teknologi, dan koordinasi lintas pihak.
- Rekomendasi strategis dan operasional untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya fiskal daerah/desa guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

C

DISIPLIN BELANJA PEMERINTAH



Triwulan I dan III monitoring atas belanja pemerintah daerah oleh rencana pengendalian, termasuk pemetaan dukungan terhadap pelaksanaan PHTC.

Triwulan II (monitoring oleh rendai dan pengawasan uji petik di daerah):

1. Analisis postur dan realisasi pendapatan & belanja pemerintah daerah, termasuk pemetaan dukungan terhadap pelaksanaan PHTC.
2. Analisis disiplin belanja pemerintah daerah, meliputi ketepatan waktu, kesesuaian peruntukan, dan kepatuhan terhadap regulasi.
3. Analisis keselarasan belanja dengan prioritas nasional dan daerah (*alignment* dengan RPJMN, RKP, dan RKPD, termasuk pemetaan dukungan terhadap pelaksanaan PHTC).
4. Analisis pola belanja pemerintah daerah.
5. Analisis kualitas belanja pemerintah daerah, termasuk efektivitas belanja berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) dan keterkaitannya dengan indikator *output/outcome*.
6. Analisis terhadap manajemen kas pemerintah daerah, meliputi kecukupan saldo kas, arus kas, dan ketepatan proyeksi, serta keterkaitannya dengan pola realisasi belanja.
7. *Root cause analysis* hambatan dan permasalahan penyerapan belanja pemerintah daerah, termasuk faktor teknis, regulasi, dan kelembagaan.
8. Rekomendasi perbaikan.



Triwulan IV (monitoring oleh rendai dan pengawasan uji petik di daerah):

1. Analisis postur dan realisasi pendapatan & belanja pemerintah daerah, meliputi struktur, deviasi, dan tren perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, termasuk pemetaan dukungan terhadap pelaksanaan PHTC.
2. Analisis disiplin belanja pemerintah daerah, termasuk kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan anggaran dan konsistensi dengan rencana awal.
3. Analisis kualitas belanja pemerintah daerah, dengan fokus pada *value for money* sektor prioritas.
4. Analisis terhadap manajemen kas pemerintah daerah, menilai efektivitas pengelolaan kas akhir tahun dan antisipasi kekurangan likuiditas.
5. Analisis kualitas rencana kebutuhan belanja beserta sumber pendapatan untuk tahun berikutnya, memastikan keberlanjutan fiskal.
6. Analisis keberlanjutan belanja, mengidentifikasi beban berulang yang dapat mempersempit ruang fiskal di tahun berikutnya.
7. Analisis kualitas pengeseran anggaran, menilai apakah revisi APBD/Pergeseran di akhir tahun mengarah pada prioritas strategis atau sekadar menyerap pagu.
8. Analisis *carry-over risk* proyek yang belum selesai dan implikasinya terhadap APBD tahun berikutnya.
9. *Root cause analysis* hambatan dan permasalahan penyerapan belanja, termasuk evaluasi terhadap kapasitas pelaksana.
10. Rekomendasi perbaikan.

D

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH



1. Potret dan profil pembiayaan daerah, meliputi:
 - a. Gambaran kebutuhan dan realisasi pembiayaan daerah.
 - b. Klasifikasi sumber pembiayaan (utang, non-utang, Kerja Sama Pemerintah dan BU (KPBU), pemanfaatan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)); dan
 - c. Distribusi sektoral dan regional pembiayaan, serta proporsinya terhadap total APBD.
2. Analisis kebijakan dan tata kelola pembiayaan daerah:
 - a. Evaluasi keselarasan kebijakan pembiayaan daerah dengan RPJMD dan kebijakan fiskal nasional.
 - b. Kelengkapan dan konsistensi regulasi daerah terkait pembiayaan, inovasi pembiayaan, dan manajemen risiko.
 - c. Kapasitas kelembagaan daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembiayaan.
3. Analisis strategi dan implementasi pembiayaan daerah, antara lain:
 - a. Penilaian terhadap strategi pembiayaan Daerah, termasuk skema inovatif yang *pro-sustainability* dan *pro-development*.
 - b. Pendalaman pengelolaan KPBU di tingkat Daerah, peran Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) Daerah, dan pemanfaatan sumber dana APBD; dan
 - c. Analisis efektivitas pengeluaran pembiayaan, terutama penyertaan modal ke BUMD sebagai instrumen pembangunan.
4. Analisis risiko pembiayaan daerah, termasuk risiko keuangan, risiko operasional, risiko regulasi, serta evaluasi efektivitas langkah mitigasi risiko yang dilakukan pemerintah daerah.
5. Potret permasalahan dan *root cause analysis* termasuk namun tidak terbatas pada: hambatan dalam pengembangan inovasi pembiayaan, penyebab rendahnya efektivitas pemanfaatan pembiayaan daerah, serta permasalahan persisten dan isu kelembagaan yang menghambat optimalisasi pembiayaan.
6. *Lessons learned* dan titik kritis, meliputi: pembelajaran dari daerah yang berhasil mengelola pembiayaan inovatif secara efektif, faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) dan pola kegagalan yang perlu dihindari, analisis komparatif dengan model pembiayaan daerah di negara lain (*benchmark*).
7. Analisis dampak pembiayaan daerah terhadap pencapaian target pembangunan daerah, serta analisis pengaruh pembiayaan terhadap ruang fiskal dan keberlanjutan fiskal jangka menengah.
8. Penyempurnaan strategi pembiayaan daerah, meliputi: diversifikasi instrumen dan sumber pembiayaan, penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem manajemen pembiayaan, dan integrasi strategi pembiayaan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
9. Rekomendasi perbaikan.



AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH/DESA

BAGIAN 3



SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 8 TOPIK DI DALAMNYA

- Analisis kinerja dan posisi keuangan daerah/desa, meliputi sumber pendapatan (PAD, TKD, Dana Otsus, pendapatan desa), struktur belanja, pembiayaan, dan implikasinya terhadap ruang fiskal, kemandirian, dan keberlanjutan.
- Simpulan keselarasan kebijakan, regulasi, dan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah/desa dengan tujuan pembangunan (RPJMN, RPJMD, UU HKPD), termasuk efektivitas perencanaan, penganggaran, dan desain intervensi program.
- Analisis disiplin dan efektivitas belanja, termasuk ketepatan waktu, kesesuaian peruntukan, *front-loading/year-end rush*, *value for money*, serta keterkaitan belanja dengan *output-outcome* prioritas.
- Analisis tata kelola pengadaan barang/jasa dan pengelolaan aset, mencakup efisiensi, transparansi, penerapan e-procurement/tender dini, serta pengelolaan risiko PBJ dan aset daerah/desa.
- Evaluasi efektivitas transfer fiskal (DAU, DAK, DBH, Dana Otsus Aceh dan Papua) dan Dana Desa, termasuk ketepatan alokasi, penyaluran, penggunaan, serta dampak terhadap capaian prioritas nasional dan lokal.
- Identifikasi hambatan utama (*root cause*) pengelolaan keuangan daerah/desa, termasuk aspek regulasi, kelembagaan, SDM, teknologi, dan koordinasi lintas pihak.
- Rekomendasi strategis dan operasional untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya fiskal daerah/desa guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

E

EFEKTIVITAS TRANSFER FISKAL DI DAERAH (DAU, DAK, DAN DBH)

1. Potret dan profil Transfer ke Daerah, meliputi:
 - a. Tren dan posisi terkini TKD secara nasional dan per daerah.
 - b. Sebaran sektoral dan regional alokasi DAU, DAK, dan DBH.
 - c. Proporsi TKD terhadap total pendapatan daerah dan kontribusinya terhadap program prioritas nasional serta PHTC.
2. Analisis kebijakan dan tata kelola TKD, meliputi:
 - a. Keselarasan kebijakan TKD dengan RPJMN, kebijakan fiskal nasional, dan prioritas pembangunan daerah.
 - b. Efektivitas dan efisiensi kebijakan alokasi, termasuk formula dan parameter yang digunakan.
 - c. Kualitas tata kelola pada tahap perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta Monev.
3. Analisis terhadap perencanaan dan pengalokasian, termasuk keterkaitannya dengan kebutuhan aktual di daerah.
4. Analisis ketepatan waktu penyaluran TKD dan identifikasi hambatan yang memicu keterlambatan penyaluran (termasuk dari aspek kapasitas SDM dan sistem informasi)
5. Analisis terhadap keselarasan penggunaan TKD dengan program prioritas nasional dan kebutuhan daerah.
6. Analisis efektivitas penggunaan dan dampak pemanfaatan TKD.
7. Analisis permasalahan dan *root cause*, termasuk hambatan kebijakan, teknis, kelembagaan, atau koordinasi lintas pemerintah yang memengaruhi efektivitas TKD.
8. Analisis praktik baik daerah yang berhasil memanfaatkan TKD secara optimal dan relevansi *best practice* internasional.
9. Rekomendasi perbaikan.



A. Efektivitas Dana Otonomi Khusus Aceh

- 1 Potret dan profil Dana Otsus Aceh
 - a. Tren alokasi dan realisasi.
 - b. Proporsi Dana Otsus terhadap total pendapatan Aceh dan kontribusinya pada sektor prioritas.
 - c. Distribusi sektoral sesuai ketentuan.
- 2 Analisis kebijakan dan tata kelola, meliputi:
 - a. Ketepatan dan keselarasan kebijakan Otsus Aceh.
 - b. Konsistensi regulasi daerah dengan UU Pemerintahan Aceh dan Perpres terkait alokasi.
 - c. Efektivitas kelembagaan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.
- 3 Analisis pengalokasian dan penyaluran
 - a. Kesesuaian pengalokasian terhadap ketentuan minimal sektor tertentu.
 - b. Analisis ketepatan waktu penyaluran dan penyebab keterlambatan.
- 4 Analisis penggunaan dan efektivitas Dana Otsus.
- 5 Analisis isu terkait koordinasi antara Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota dan risiko penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan sektoral.

- 6 *Root cause analysis*, termasuk hambatan kelembagaan, pengendalian internal, dan akuntabilitas.
- 7 *Lesson learned*.
- 8 Rekomendasi perbaikan.

B. Efektivitas Dana Otonomi Khusus – Papua (Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan)

- 1 Potret dan profil Dana Otsus Papua
 - a. Tren alokasi dan realisasi.
 - b. Proporsi Dana Otsus terhadap total pendapatan provinsi/kabupaten/kota di Papua.
 - c. Distribusi sektoral sesuai ketentuan minimal.
- 2 Analisis kebijakan dan tata kelola, meliputi:
 - a. Keselarasan kebijakan Otsus Papua dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
 - b. Efektivitas mekanisme perencanaan terpadu antar provinsi dan kabupaten/kota.
 - c. Evaluasi peraturan teknis yang mengatur penyaluran dan penggunaan Dana Otsus pasca pemekaran Dana Otonomi Baru (DOB).
- 3 Analisis pengalokasian dan penyaluran
 - a. Kesesuaian pengalokasian terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan prioritas daerah.
 - b. Analisis ketepatan waktu penyaluran dari pusat ke daerah, termasuk kendala administrasi DOB.
- 4 Analisis penggunaan dan efektivitas Dana Otsus, termasuk terhadap pembangunan SDM Orang Asli Papua (OAP), serta efektivitas intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi.
- 5 Analisis dampak pemekaran DOB terhadap distribusi Dana Otsus, serta analisis risiko penyalahgunaan dan lemahnya kapasitas tata kelola.
- 6 *Root cause analysis*, antara lain hambatan kelembagaan, pengendalian internal, dan akuntabilitas.
- 7 *Lesson learned*.
- 8 Rekomendasi perbaikan.



AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH/DESA

BAGIAN 4



SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 8 TOPIK DI DALAMNYA

- Analisis kinerja dan posisi keuangan daerah/desa, meliputi sumber pendapatan (PAD, TKD, Dana Otsus, pendapatan desa), struktur belanja, pembiayaan, dan implikasinya terhadap ruang fiskal, kemandirian, dan keberlanjutan.
- Simpulan keselarasan kebijakan, regulasi, dan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah/desa dengan tujuan pembangunan (RPJMN, RPJMD, UU HKPD), termasuk efektivitas perencanaan, penganggaran, dan desain intervensi program.
- Analisis disiplin dan efektivitas belanja, termasuk ketepatan waktu, kesesuaian peruntukan, *front-loading/year-end rush*, *value for money*, serta keterkaitan belanja dengan *output-outcome* prioritas.
- Analisis tata kelola pengadaan barang/jasa dan pengelolaan aset, mencakup efisiensi, transparansi, penerapan e-procurement/tender dini, serta pengelolaan risiko PBJ dan aset daerah/desa.
- Evaluasi efektivitas transfer fiskal (DAU, DAK, DBH, Dana Otsus Aceh dan Papua) dan Dana Desa, termasuk ketepatan alokasi, penyaluran, penggunaan, serta dampak terhadap capaian prioritas nasional dan lokal.
- Identifikasi hambatan utama (*root cause*) pengelolaan keuangan daerah/desa, termasuk aspek regulasi, kelembagaan, SDM, teknologi, dan koordinasi lintas pihak.
- Rekomendasi strategis dan operasional untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya fiskal daerah/desa guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

G

AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA



1. Potret keuangan desa dan capaian pembangunan desa
2. Analisis koordinasi lintas sektor dalam mendukung fokus utama pembangunan desa.
3. Analisis kualitas belanja pemerintah desa (kualitas perencanaan dan penganggaran)
4. Analisis kapasitas fiskal desa dalam mendukung prioritas pembangunan pemerintah (KDMP) dan kapasitas fiskal desa dalam pembangunan berdasarkan potensi lokal desa
5. Analisis Bauran Intervensi Fokus Pembangunan desa meliputi penanganan kemiskinan/kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan desa, pengembangan lembaga ekonomi desa (BUM Desa dan KDMP), dan pemberdayaan masyarakat desa
6. Analisis bauran intervensi dan konvergensi desain kebijakan terkait tata kelola, keuangan, dan pembangunan desa dengan pemerintah daerah dan pusat
7. *Root cause analysis* atas hambatan dan permasalahan dalam Pembangunan desa
8. Rekomendasi perbaikan





1. Analisis kebijakan PBJ Daerah
 - a. Keselarasan kebijakan PBJ daerah dengan peraturan perundangan nasional dan kebijakan pengadaan strategis pemerintah pusat.
 - b. Kecukupan dan ketepatan regulasi daerah dalam mendukung efisiensi, efektivitas, dan *value for money* PBJ.
 - c. Integrasi kebijakan PBJ dengan RPJMD, RKP Daerah, dan prioritas pembangunan.
2. Analisis kapasitas kelembagaan PBJ Daerah
 - a. Struktur organisasi UKPBJ, jumlah dan kompetensi SDM, sertifikasi, serta kelengkapan perangkat pendukung (SOP, sistem informasi, peralatan).
 - b. Kemandirian dan kapasitas koordinasi UKPBJ dengan perangkat daerah lainnya.
3. Analisis akuntabilitas pelaksanaan PBJ
 - a. Potret rencana PBJ (jenis, nilai, proporsi terhadap total belanja daerah).
 - b. Analisis realisasi PBJ, termasuk tingkat pelaksanaan tender dini (*early procurement*) dan penyerapan anggaran.
 - c. Identifikasi *bottleneck* proses PBJ.
4. Analisis efisiensi PBJ
 - a. Perbandingan harga satuan dengan benchmark nasional/daerah.
 - b. Penggunaan e-procurement dan e-marketplace serta dampaknya terhadap efisiensi biaya dan waktu.
 - c. Analisis *procurement cycle time* dan *cost saving*.
5. Analisis efektivitas pengelolaan risiko PBJ
 - a. Identifikasi risiko utama PBJ (termasuk keuangan, hukum, teknis, reputasi, dan kecurangan).
 - b. Evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PBJ.
6. *Root cause analysis* permasalahan PBJ daerah, meliputi:
 - a. Hambatan regulasi, kapasitas SDM, kelembagaan, teknologi, dan koordinasi lintas perangkat daerah.
 - b. Penyebab berulangnya keterlambatan, pembatalan, atau kegagalan PBJ.
7. Analisis praktik terbaik PBJ daerah yang efisien, transparan, dan berorientasi *value for money*, serta perbandingan dengan praktik PBJ di negara atau daerah lain yang memiliki tingkat efisiensi tinggi.
8. Rekomendasi perbaikan.



AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA/DAERAH YANG DIPISAHKAN



SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 8 TOPIK DI DALAMNYA

- Analisis kinerja keuangan dan operasional korporasi milik negara/daerah (BUMN, BUMD, BLU/BLUD) meliputi tren pendapatan, laba/rugi, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, efisiensi proses, kualitas layanan, dan keberlanjutan usaha.
- Penilaian kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) termasuk kecukupan infrastruktur, efektivitas penerapan, peran Satuan Pengawasan Intern, serta kolaborasi lintas entitas dan sektor.
- Evaluasi keselarasan kebijakan, strategi, dan rencana bisnis dengan RPJMN/RPJMD, efektivitas restrukturisasi, inovasi model bisnis/layanan, digitalisasi, serta optimalisasi sumber daya strategis (SDM, aset, PBJ, tarif layanan).
- Identifikasi permasalahan, hambatan kelembagaan, teknis, dan regulasi; termasuk *root cause analysis* serta potensi risiko *fraud* yang relevan.
- Analisis kontribusi dan peran strategis dalam Program Prioritas Pemerintah (PHTC), meliputi sektor infrastruktur, pangan, kesehatan, pendidikan, dan jasa keuangan; meliputi koordinasi lintas pihak, fleksibilitas pembiayaan, serta mitigasi risiko.

A

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN BUMN/BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA)



1. Potret dan profil BUMN
 - a. Kinerja keuangan: tren pendapatan, laba bersih, likuiditas, *Debt to Equity Ratio* (DER), *Return on Equity* (ROE), dan arus kas operasi
 - b. Kinerja operasional: kualitas produk/jasa, ketepatan waktu, efisiensi proses, keamanan.
 - c. Efektivitas subsidi pemerintah terhadap capaian kinerja BUMN.
 - d. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha.
2. Peran BUMN dalam prioritas pembangunan
 - a. Analisis titik kritis tata kelola BUMN dalam pelaksanaan penugasan pemerintah dan/atau peran dalam prioritas pembangunan
 - b. Analisis kebijakan, kelembagaan dan koordinasi lintas sektoral dalam penugasan pemerintah kepada BUMN
 - c. Analisis keberlanjutan pendanaan dan/atau pembiayaan program prioritas pembangunan yang melibatkan peran BUMN
3. Analisis kualitas Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan (GRC) BUMN:
 - a. Titik kritis penguatan tata kelola BUMN, termasuk penguatan *holding-subsidiary governance*;
 - b. Efektivitas manajemen risiko BUMN, termasuk risiko *fraud*;
 - c. Peran dan efektivitas Satuan Pengawas Internal BUMN dalam penguatan GRC.
4. Rekomendasi perbaikan



B**AKUNTABILITAS
KINERJA DAN
KEUANGAN BUMD**

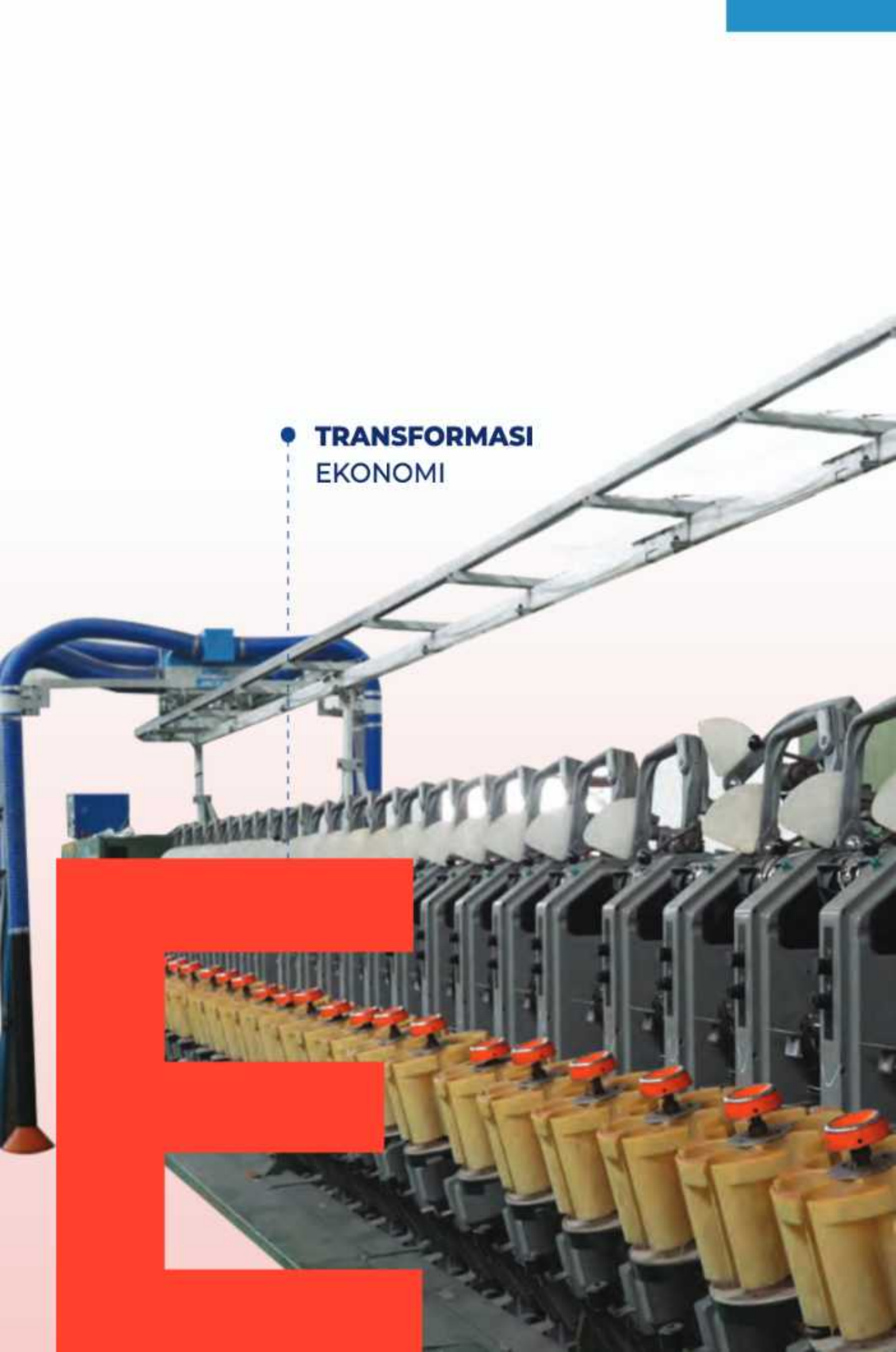
1. Potret dan profil kinerja BUMD
 - a. Kinerja keuangan, meliputi pada pertumbuhan pendapatan dan laba bersih, likuiditas, pengelolaan utang, pengembalian investasi, dan keberlanjutan usaha; dan,
 - b. Kinerja operasional
2. Analisis efektivitas peran dan daya ungkit BUMD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
 - a. Analisis nasional dan regional atas keterlibatan dan efektivitas peran BUMD dalam pembangunan daerah, fokus pada sektor energi, transportasi, keuangan dan pengelolaan air,
 - b. Analisis kecukupan, ketepatan, keselarasan kebijakan serta koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMD dalam penyelenggaraan program-program pembangunan daerah, termasuk subsidi pemerintah pusat/daerah dan efektivitasnya,
 - c. Analisis risiko, termasuk risiko *fraud*.
3. Analisis kualitas GRC BUMD
 - a. Kelengkapan infrastruktur dan kualitas penerapan GRC di BUMD
 - b. Analisis kelemahan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang menghambat kinerja Perusahaan, termasuk peran organ perusahaan yang tidak berjalan secara optimal
 - c. Efektivitas manajemen risiko di lingkungan BUMD, termasuk risiko *fraud*.
 - d. Potret Evaluasi kontribusi SPI terhadap peningkatan kualitas GRI dan pengendalian risiko badan usaha
4. Identifikasi hambatan dan permasalahan dalam penguatan tata kelola BUMD maupun optimalisasi perannya dalam Pembangunan daerah
5. Rekomendasi perbaikan

C**AKUNTABILITAS TATA KELOLA
KINERJA DAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)/
BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH (BLUD)**

1. Analisis kecukupan, ketepatan, dan keselarasan kebijakan pengelolaan BLU/BLUD
2. Analisis efektivitas kinerja keuangan dan operasional BLU
 - a. Dampak fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU/BLUD terhadap keterjangkauan dan kualitas layanan publik yang diselenggarakan
 - b. Efektivitas pengelolaan dana sektoral melalui BLU/BLUD terhadap belanja Pemerintah Pusat/Daerah, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perkebunan, dan pembiayaan UMKM.
3. Analisis percepatan tujuan penerapan BLU, termasuk kontribusinya terhadap program pemerintah
4. Analisis kualitas desain dan efektivitas penerapan GRCC pada BLU/BLUD
 - a. Analisis kualitas perencanaan strategis BLU/BLUD
 - b. Analisis kualitas infrastruktur dan implementasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
 - c. Analisis efektivitas peran SPI dalam peningkatan kualitas GRCC BLU/BLUD
 - d. Titik kritis penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang menghambat percepatan tujuan pembentukan BLU/BLUD
5. Analisis kualitas desain dan efektivitas implementasi manajemen risiko (termasuk risiko kecurangan)
6. Permasalahan dan hambatan BLU/BLUD dalam penyediaan layanan dan/atau mendukung program pemerintah
7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

The background image shows a row of industrial machines, possibly textile looms, with yellow bobbins and red handles. A large, solid red shape, resembling a stylized letter 'F' or a bracket, is overlaid on the left side of the image. A dashed vertical line extends from the text 'TRANSFORMASI EKONOMI' down to the machinery.

● TRANSFORMASI EKONOMI



TRANSFORMASI EKONOMI

Simpulan atas efektivitas Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri dalam Negeri

Simpulan atas efektivitas Pengembangan Kawasan dan Pembangunan Kewilayahan

Analisis kontribusi daya saing industri terhadap:
a. PDB; c. ekspor;
b. lapangan kerja; d. neraca perdagangan.

Analisis dampak Pembangunan Kawasan dan Kewilayahan terhadap pertumbuhan ekonomi

Simpulan atas efektivitas Peningkatan Keterserapan dan Perlindungan tenaga kerja

Hambatan dan Permasalahan Transformasi Ekonomi

Analisis dampak keterserapan dan perlindungan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi

Rekomendasi

SIMPULAN TINGKAT SEKTOR INI
DIBANGUN DARI SIMPULAN ANTARA
PADA 3 TEMA DI DALAMNYA





TEMA 1.

**PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
DAN DAYA SAING INDUSTRI
DALAM NEGERI**



TEMA 2.

**PENINGKATAN KETERSERAPAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA**



TEMA 3.

**PENGEMBANGAN KAWASAN
DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN**



PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING INDUSTRI DALAM NEGERI

BAGIAN 1

SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 6 TOPIK DI DALAMNYA

- Simpulan Potret Produktivitas dan Daya Saing Industri Dalam Negeri
- Simpulan atas Efektivitas Intervensi Pemerintah terhadap Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri, meliputi:
 - a. Industri Pengolahan;
 - b. Industri Padat Karya;
 - c. Industri Baterai;
 - d. Industri Pariwisata;
 - e. Investasi dan Kemudahan Perizinan; dan
 - f. Pengelolaan Keamanan dan Mutu Produk Industri dalam Kemasan
- Simpulan efektivitas optimalisasi peluang dan mitigasi tantangan perdagangan global dan domestik, serta keterkaitannya terhadap produktivitas dan daya saing Industri
- Hambatan dan Permasalahan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Dalam Negeri
- Rekomendasi

A

PENGUATAN DAYA SAING INDUSTRI PENGOLAHAN



1. Potret Perbandingan Kinerja Industri Pengolahan Indonesia terhadap Negara Kompetitor Utama
2. Analisis Ketepatan, Kecukupan dan Keselarasan Bauran Kebijakan K/L/D dalam Penguatan Daya Saing Industri Pengolahan
3. Efektivitas Intervensi Pemerintah terhadap Penguatan Daya Saing Industri Pengolahan Nasional, antara lain meliputi Penyediaan Pendanaan/Investasi, Infrastruktur, Teknologi, Akses/Perluasan Pasar, dan Insentif
4. Efektivitas Utilisasi Kawasan Industri (KI) dalam mendukung Penguatan Daya Saing Industri Pengolahan
5. Analisis Peran dan Kontribusi BUMN dalam Penguatan Daya Saing Industri Pengolahan
6. Efektivitas Pengembangan Inovasi Teknologi Industri dalam Mendukung Peningkatan Daya Saing Industri Pengolahan
7. Analisis Dampak Daya Saing Industri Pengolahan Nasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi (penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor, dsb)
8. Identifikasi Hambatan dan Permasalahan yang menghambat Penguatan Daya Saing Industri Pengolahan
9. Rekomendasi

B**PENYELAMATAN
INDUSTRI PADAT
KARYA**

1. Potret kondisi Industri Padat Karya Nasional antara lain meliputi kontribusi PDB, penyerapan tenaga kerja, kinerja ekspor, dan keberlangsungan industrinya.
2. Analisis Kecukupan dan Kesejarasan Kebijakan dan Kelembagaan Keberlangsungan Industri Padat Karya
3. Analisis efektivitas bauran intervensi lintas K/L terkait peningkatan produktivitas industri padat karya, antara lain:
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia industri padat karya;
 - b. Peningkatan investasi pada industri padat karya;
 - c. Penyerapan tenaga kerja lokal dalam industri padat karya;
 - d. Fasilitasi permodalan bagi industri padat karya;
 - e. Perluasan dan kemudahan akses pasar bagi produk padat karya;
4. Efektivitas pemantauan keberlangsungan industri padat karya.
5. Efektivitas pengamanan dan penyelamatan industri padat karya yang menghadapi ancaman keberlangsungan.
6. Identifikasi permasalahan dan hambatan bagi pertumbuhan industri padat karya
7. Rekomendasi

C**PERCEPATAN
PEMBANGUNAN
EKOSISTEM INDUSTRI
BATERAI**

1. Potret Kondisi Ekosistem Industri Baterai Nasional
2. Analisis Ketepatan dan Kecukupan Kebijakan, Kelembagaan/Strategi Pembangunan Ekosistem Baterai
3. Analisis pemetaan target pembangunan ekosistem baterai nasional Tahun 2026, dan analisis kesenjangan (*gap analysis*) terhadap progres capaian
4. Analisis keterisian pohon industri nikel dalam mendukung kemandirian ekosistem industri baterai
5. Efektivitas Penyediaan Dukungan Pembangunan Ekosistem Industri Baterai:
 - a. Penyediaan investasi
 - b. Penyediaan dan utilisasi infrastruktur
 - c. Penyediaan dan utilisasi teknologi
6. Kecukupan Penyediaan Tenaga Kerja (kuantitas dan kualitas) untuk Kebutuhan Industri dalam Ekosistem Baterai
7. Kecukupan Fasilitasi dan Perluasan Akses Pasar dan/atau Demand terhadap Produk Ekosistem Baterai
8. Identifikasi Hambatan dan Permasalahan dalam Pembangunan Ekosistem Baterai
9. Rekomendasi



PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING INDUSTRI DALAM NEGERI

BAGIAN 2

SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 6 TOPIK DI DALAMNYA

- Simpulan Potret Produktivitas dan Daya Saing Industri Dalam Negeri
- Simpulan atas Efektivitas Intervensi Pemerintah terhadap Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri, mencakup:
 - a. Industri Pengolahan;
 - b. Industri Padat Karya;
 - c. Industri Baterai;
 - d. Industri Pariwisata;
 - e. Investasi dan Kemudahan Perizinan; dan
 - f. Pengelolaan Keamanan dan Mutu Produk Industri dalam Kemasan
- Simpulan efektivitas optimalisasi peluang dan mitigasi tantangan perdagangan global dan domestik, serta keterkaitannya terhadap produktivitas dan daya saing Industri
- Hambatan dan Permasalahan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Dalam Negeri
- Rekomendasi

D

PENGUATAN INVESTASI DAN KEMUDAHAN PERIZINAN



1. Analisis pemetaan target penyediaan investasi Tahun 2026, serta analisis kesenjangannya (*gap analysis*) terhadap capaian penyediaan
2. Analisis Ketepatan dan Keselarasan Strategi/Kebijakan Pemerintah (*Grand Design* dan *Road Map*) atas Penguatan Investasi di Pusat dan Daerah
3. Analisis Ketepatan dan Kecukupan Kelembagaan atas Penguatan Investasi, Koordinasi antar K/L, BUMN, serta dengan pemerintah daerah
4. Analisis dan Simpulan atas Akuntabilitas Implementasi *Online Single Submission* (OSS) di Pusat dan Daerah
5. Akuntabilitas dan Efektivitas Pemberian Dukungan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal
6. Potret Peningkatan Investasi dalam Mendukung Peningkatan Industri dan Hilirisasi, UMKM, dan Pariwisata
7. Hambatan dan Permasalahan dalam Penguatan Investasi dan Kemudahan Perizinan
8. Analisis risiko *fraud*
9. Rekomendasi

E**PENGEMBANGAN
INDUSTRI PARIWISATA
YANG BERKUALITAS**

1. Potret Kontribusi Industri Pariwisata terhadap Perekonomian di Indonesia
2. Analisis ketepatan, Kecukupan dan Keselarasan Kebijakan dalam Penguatan Industri Pariwisata
3. Analisis Efektivitas Peningkatan Nilai Keekonomian Pariwisata, melalui:
 - a. Pengembangan Event Pariwisata bernilai Ekonomi Tinggi
 - b. Inovasi dan Diversifikasi Produk Pariwisata
4. Efektivitas Program Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Industri Pariwisata
5. Analisis Kecukupan Amenitas, Aksesibilitas, dan Fasilitas Industri Pariwisata
6. Analisis Ketepatan Kebijakan Pembentukan Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF)
7. Potret Capaian Pembentukan IQTF
8. Hambatan dan Permasalahan Pengembangan Industri Pariwisata Berkualitas
9. Rekomendasi

F**TATA KELOLA
KEAMANAN DAN MUTU
PRODUK INDUSTRI
DALAM KEMASAN**

1. Potret dan analisis permasalahan mutu dan keamanan produk industri dalam kemasan, antara lain meliputi bentuk dan frekuensi dan keterjadian penyimpangan, sebaran keterjadian pelanggaran, sebaran laporan konsumen, dan tingkat penindakan.
2. Analisis kecukupan kerangka kebijakan dan kelembagaan (mencakup tujuan, indikator kinerja, kerangka intervensi, dan aransemen pembagian/penurunan kinerja lintas K/L/D) terkait standarisasi dan pengujian mutu/keamanan produk, pengawasan kepatuhan, penanganan laporan konsumen, serta penindakan atas penyimpangan.
3. Analisis akuntabilitas keuangan dan kinerja (efektivitas) atas:
 - a. Pelaksanaan penjaminan mutu dan keamanan produk kemasan, terutama melalui sertifikasi dan pelabelan.
 - b. Pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu produk dalam kemasan.
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut laporan konsumen dan penindakan atas penyimpangan.
4. Analisis dampak permasalahan tata kelola keamanan dan mutu produk industri kemasan terhadap daya saing produk industri.
5. Hambatan dan permasalahan dalam penjaminan, pengawasan, dan penindakan.
6. Rekomendasi



PENINGKATAN KETERSERAPAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA



**SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI
HASIL PENGAWASAN PADA 2 TOPIK DI DALAMNYA**

- Simpulan Potret Keterserapan dan Perlindungan Tenaga Kerja
- Simpulan atas Efektivitas Perlindungan Tenaga Kerja
- Simpulan atas Efektivitas Peningkatan Keterserapan Tenaga kerja
- Hambatan dan Permasalahan Peningkatan Keterserapan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- Rekomendasi

A

PENGUATAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA



1. Potret Permasalahan terkait Pemenuhan Perlindungan Pekerja Domestik dan Migran, meliputi:
 - a. Tren Keterjadian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 - b. Sistem Kontrak pada Tenaga Kerja Waktu Tertentu;
 - c. Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan terhadap Pekerja (pembayaran gaji, jaminan tenaga kerja dll)
 - d. Pembayaran Pesangon kepada Tenaga Kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja
2. Analisis Kecukupan Kebijakan dan Kelembagaan Perlindungan Tenaga Kerja Domestik dan Migran;
3. Analisis atas Kepatuhan dan Efektivitas Perlindungan:
 - a. Hak pegawai/hak atas status hubungan kerja (Kontrak)
 - b. Pengupahan
 - c. Keselamatan kerja
 - d. Pekerja Migran Indonesia (PMI)
4. Analisis atas Kepatuhan dan Efektivitas Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja
5. Analisis atas Kepatuhan dan Efektivitas Penyelesaian Konflik Hubungan Kerja dan Industrial
6. Analisis atas Perlindungan atas Pemutusan Hubungan Kerja, serta Penanganan Dampak dari Pemutusan Hubungan Kerja
7. Analisis atas Kepatuhan Posisi Jabatan Tenaga Kerja Asing yang ada di Indonesia
8. Analisis Efektivitas Bauran Perlindungan Tenaga Kerja
9. Hambatan dan Permasalahan atas Efektivitas Perlindungan Tenaga Kerja
10. Rekomendasi



-

PENGEMBANGAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN



SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 4 TOPIK DI DALAMNYA

- Simpulan Potret Pembangunan Kawasan dan Kewilayahan
- Simpulan Efektivitas Pengembangan Sentra Ekonomi dan Kewilayahan
- Simpulan Efektivitas Pengembangan Ekspor Berbasis Kewilayahan
- Simpulan Efektivitas Peningkatan Perdagangan Domestik antar Wilayah
- Simpulan Efektivitas Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- Simpulan Efektivitas Pembangunan Perkotaan
- Hambatan dan Permasalahan Pembangunan Kawasan dan Kewilayahan.
- Rekomendasi

A

PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA EKONOMI DAN PERDAGANGAN



1. Potret pemetaan target dan indikator kinerja pembangunan kawasan Tahun 2026, serta analisis kesenjangan (*gap analysis*) nya terhadap progres capaian
2. Analisis keselarasan strategi pembangunan kawasan terhadap strategi pembangunan kewilayahan maupun strategi pembangunan ekonomi
3. Analisis Kecukupan dan Keselarasan Kebijakan
4. Analisis Kapasitas dan Tata Kelola Kelembagaan
5. Analisis Efektivitas Penguatan:
 - a. Produktivitas, Investasi, Riset dan Inovasi
 - b. SDM dan Promosi
6. Analisis Efektivitas Pengembangan Kawasan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Peningkatan Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Khususnya Kewilayahan
7. Analisis Efektivitas Pemanfaatan Insentif Fiskal dan Non Fiskal
8. Analisis Efektivitas Utilisasi Kawasan dalam Mendukung Penguatan Daya Saing Industri serta Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
9. Hambatan dan Permasalahan Pengembangan Kawasan
10. Rekomendasi



B**PENGUATAN PERTUMBUHAN EKSPOR DAN PERDAGANGAN DOMESTIK BERBASIS KEWILAYAHAN**

1. Analisis Ketepatan dan Kecukupan Strategi Pemerintah (*Grand Design* dan *Road Map*) Ekspor dan Perdagangan Domestik berbasis Kewilayahan
2. Analisis perbandingan target terhadap capaian kinerja pemerataan dan pertumbuhan ekspor antar wilayah, serta perdagangan domestik lintas wilayah.
3. Analisis Kecukupan dan Ketepatan Kelembagaan Ekspor dan Perdagangan Domestik antar wilayah
4. Analisis Ketepatan, Kecukupan, dan Keselarasan Bauran Kebijakan K/L/D dalam Ekspor dan Perdagangan Domestik antar wilayah
5. Analisis atas Akuntabilitas (Keuangan dan Kinerja) dan Tata Kelola Ekspor dan Perdagangan Domestik antar Wilayah Minimal Mencakup Program/kegiatan:
 - a. Riset dan Diversifikasi Pasar
 - b. Promosi dan *Branding* Perdagangan Luar Negeri
 - c. Dukungan Daerah Kewilayahan
6. Analisis efektivitas dan dampak ekspor dan perdagangan domestik antar wilayah terhadap pembangunan kewilayahan
7. Hambatan dan Permasalahan (*Root Cause Analysis*)
8. Rekomendasi

C**PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

1. Analisis Kecukupan dan Ketepatan Strategi Kebijakan Transmigrasi dalam mendorong pemerataan pembangunan kewilayahan
2. Analisis perbandingan target kinerja pelaksanaan transmigrasi Tahun 2026 terhadap progres capaian pelaksanaan Transmigrasi
3. Analisis Capaian Redistribusi Tanah bagi Warga Transmigrasi
4. Analisis Kecukupan dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Pemukiman dan Aksesibilitas Logistik
5. Analisis Perlibatan Warga Transmigrasi pada Ekonomi Lokal
6. Analisis Tingkat Keterhubungan Kawasan Transmigrasi ke Pusat Ekonomi.
7. Analisis ketepatan dan kecukupan dukungan pemerintah daerah setempat terhadap kelancaran pelaksanaan transmigrasi
8. Hambatan dan Permasalahan (*Root Cause Analysis*)
9. Rekomendasi

D**PENGAWASAN KEWILAYAHAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN (URBAN DEVELOPMENT)**

1. Analisis potret kontribusi perkotaan terhadap perekonomian nasional, antara lain meliputi kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan investasi, dan penyerapan tenaga kerja
2. Analisis pemetaan target kinerja pembangunan aglomerasi perkotaan (khususnya Tahun 2026), serta analisis kesenjangan (*gap analysis*) terhadap progres capaian.
3. Analisis ketepatan, ketepatan dan keselarasan kebijakan pembangunan perkotaan, meliputi aspek pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas hidup, serta mobilitas dan konektivitas.
4. Analisis kualitas perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang perkotaan
5. Analisis efektivitas intervensi K/L/D dalam pembangunan perkotaan, minimal meliputi: aksesibilitas atas layanan dasar, sanitasi dan penataan persampahan, ketersediaan dan produktivitas lapangan kerja, serta mobilitas warga, termasuk penyediaan layanan angkutan umum massal kawasan perkotaan
6. *Root cause analysis* permasalahan proyek Pembangunan perkotaan
7. Rekomendasi perbaikan



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

● **KETAHANAN**
PANGAN





KETAHANAN PANGAN

Analisis keberadaan, kecukupan, dan ketepatan *Grand Design* Swasembada Pangan

Potret target dan capaian swasembada pangan

Analisis *gap*/selisih antara kebutuhan dan pencapaian swasembada pangan (surplus/minus)

Analisis pemenuhan *gap*/selisih antara kebutuhan dan pencapaian swasembada pangan (impor/ekspor/lainnya)

Analisis *root cause* permasalahan pencapaian swasembada pangan

Analisis Capaian Indeks Kesejahteraan Petani beserta identifikasi permasalahan yang menghambat capaian

Analisis Efektivitas Bauran Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Analisis kelengkapan, kecukupan, kualitas, serta integrasi data sektor pangan

SIMPULAN TINGKAT SEKTOR INI
DIBANGUN DARI SIMPULAN ANTARA
PADA 2 TEMA DI DALAMNYA





TEMA 1.
**PENINGKATAN
PRODUKSI PANGAN**



TEMA 2.
**KETERJANGKAUAN DAN
KETERSEDIAAN PANGAN**



TEMA 1.

PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN

BAGIAN 1



SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 7 TOPIK DI DALAMNYA

- Gambaran umum kecukupan (perbandingan kebutuhan dengan produksi dan sebaran wilayah atas 14 komoditas pangan) dan *sustainability* produksi dalam mendukung swasembada pangan.
- Analisis ketepatan kebijakan/*grand* desain peningkatan produksi pangan dalam mendukung swasembada pangan, termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah.
- Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan
- Simpulan efektivitas peningkatan produksi dan produktivitas 14 (empat belas) komoditas pangan.
- Risiko yang belum termitigasi.
- Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi simpulan efektivitas pelaksanaan program.

A

TATA KELOLA LAHAN PERTANIAN



1. Gambaran umum pemanfaatan lahan pertanian (luas lahan, luas lahan produktif dan sebaran per wilayah dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya)
2. Analisis ketepatan dan *sustainability* rancangan kebijakan pemanfaatan lahan pertanian
3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan
4. Keselarasan rancangan dan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah
5. Analisis pelaksanaan program Cetak Sawah
6. Analisis permasalahan (*root cause*) dan kondisi lahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah
7. Risiko yang belum termitigasi
8. Simpulan efektivitas pelaksanaan program
9. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi



B

TATA KELOLA PROGRAM BIBIT DAN BENIH UNGGUL



1. Gambaran umum kecukupan pemenuhan bibit dan benih nasional (kebutuhan, produksi, impor dan sebaran per wilayah)
2. Analisis ketepatan dan sustainability rancangan kebijakan program bibit dan benih unggul
3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan
4. Keselarasan rancangan dan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah
5. Analisis kemampuan penyediaan benih dan bibit oleh industri dalam negeri (ketergantungan benih dan bibit terhadap produk impor)
6. Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk ketepatan sasaran, waktu, kualitas, jenis, dan administrasi)
7. Analisis permasalahan (*root cause*) dan kondisi (kecukupan dan sebaran) bibit dan benih yang perlu menjadi perhatian pemerintah
8. Risiko yang belum termitigasi
9. Simpulan efektivitas pelaksanaan program
10. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi

Peran BUMN dalam Tata Kelola Program Bibit dan Benih Unggul

1. Peta BUMN dalam tata kelola bibit dan benih unggul
2. Analisis ketercapaian penugasan pemerintah oleh BUMN
3. Analisis potensi produksi BUMN (bibit dan benih) dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri
4. Analisis daya saing produksi BUMN (bibit dan benih) terhadap produk impor

C

TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI



1. Gambaran umum kecukupan pemenuhan pupuk nasional (kebutuhan, produksi, surplus/defisit, ekspor/impor dan sebaran per wilayah)
2. Akuntabilitas perencanaan dan penganggaran pupuk bersubsidi
 - a. ketepatan perhitungan kebutuhan dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi
 - b. ketepatan penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi; dan
 - c. ketepatan pengalokasian anggaran pupuk bersubsidi
3. Akuntabilitas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi
4. Ketepatan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi (ketepatan sasaran, waktu, jumlah, serta mekanisme pengawasan)
5. Risiko yang belum termitigasi
6. Simpulan efektivitas kebijakan pemenuhan pupuk bersubsidi terhadap produktivitas pangan
7. Analisis atas tata kelola sistem informasi pupuk bersubsidi yang terintegrasi
8. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi

Peran BUMN dalam Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

1. Peta BUMN dalam Tata Kelola Pupuk Nasional
2. Kinerja dan akuntabilitas pemenuhan pupuk bersubsidi oleh BUMN
3. Akuntabilitas penyaluran pupuk bersubsidi oleh BUMN



TEMA 1.

PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN

BAGIAN 2



SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 7 TOPIK DI DALAMNYA

- Gambaran umum kecukupan (perbandingan kebutuhan dengan produksi dan sebaran wilayah atas 14 komoditas pangan) dan *sustainability* produksi dalam mendukung swasembada pangan.
- Analisis ketepatan kebijakan/*grand* desain peningkatan produksi pangan dalam mendukung swasembada pangan, termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah.
- Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan
- Simpulan efektivitas peningkatan produksi dan produktivitas 14 komoditas pangan.
- Risiko yang belum termitigasi.
- Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.

D

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PANGAN NASIONAL



1. Potret sebaran dan kondisi infrastruktur pangan (analisis regional)
2. Gambaran alokasi belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pangan (jaringan irigasi, perpompaan untuk pertanian)
3. Akuntabilitas keuangan dan progres kinerja pembangunan infrastruktur pangan (termasuk ketepatan sasaran, waktu, kualitas, jenis, dan administrasi)
4. Keselarasan rancangan dan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah
5. Analisis efektivitas pembangunan infrastruktur pangan dalam mendorong peningkatan produksi pangan
6. Permasalahan dan kondisi (kecukupan dan sebaran) infrastruktur pangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah
7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi

E

PENINGKATAN DUKUNGAN PERALATAN PRODUKSI PANGAN (ALSINTAN)



1. Gambaran umum kecukupan dukungan alsintan (kebutuhan, penyaluran, dan sebaran)
2. Analisis ketepatan dan *sustainability* rancangan bauran kebijakan dukungan peralatan produksi pangan
3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan
4. Analisis kondisi, kecukupan, serta pemanfaatan alsintan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat dan daerah
5. Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk ketepatan sasaran, waktu, kualitas, jenis, dan administrasi)
6. Permasalahan (*root cause*) dan kondisi (kecukupan, sebaran, dan pemanfaatan) alsintan yang perlu menjadi perhatian pemerintah
7. Risiko yang belum termitigasi
8. Analisis efektivitas kebijakan dukungan peralatan produksi pangan dalam meningkatkan produksi pangan
9. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi



F**PENANGANAN
PASCA PANEN**

1. Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan dalam meningkatkan kemampuan penanganan pasca panen
2. Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan
3. Analisis pemanfaatan teknologi pertanian dalam penanganan pasca panen
4. Simpulan efektivitas bauran kebijakan penanganan pasca panen dalam meningkatkan kualitas hasil produksi pangan
5. Permasalahan (root cause) dalam penanganan pasca panen yang perlu menjadi perhatian pemerintah
6. Risiko yang belum termitigasi
7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi

G**PENDAYAGUNAAN
PENYULUH PERTANIAN**

1. Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan dan anggaran penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam rangka pencapaian swasembada pangan
2. Analisis proses pengalihan penyuluh pertanian dari Pemda kepada Kementerian Pertanian
3. Standarisasi kompetensi dan standar jabatan penyuluh pertanian
4. Peta dan sebaran penyuluh pertanian, termasuk kebutuhan penyuluh
5. Pembentukan dan penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani
6. Dukungan penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung tugas penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan
7. Optimalisasi peran penyuluh pertanian dalam pelaksanaan percepatan swasembada pangan berkelanjutan
8. Permasalahan (root cause) optimalisasi peran penyuluh pertanian dalam rangka pencapaian swasembada pangan
9. Risiko yang belum termitigasi
10. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi



KETERJANGKAUAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN

BAGIAN 1



**SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI
HASIL PENGAWASAN PADA 3 TOPIK DI DALAMNYA**

- Gambaran umum ketersediaan, stabilitas harga dan sebaran wilayah atas 14 (empat belas) komoditas pangan.
- Analisis ketepatan kebijakan/*grand design* peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah.
- Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan
- Simpulan efektivitas ketersediaan dan stabilitas harga atas 14 (empat belas) komoditas pangan.
- Risiko yang belum termitigasi.
- Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.

A

STABILISASI HARGA DAN SUPPLY CHAIN KOMODITAS PANGAN



Triwulan I, II, III, IV:

1. Pemantauan harga 14 (empat belas) komoditas pangan
2. Pemantauan Neraca Pangan
3. Dalam hal terdapat komoditas yang harga dan/atau ketersediaannya bergejolak, dilanjutkan dengan pengawasan terhadap rantai pasok (*supply chain*) komoditas tersebut

Triwulan III:

1. Gambaran umum kebutuhan, produksi dan sebaran wilayah atas 14 (empat belas) komoditas pangan
2. Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan stabilisasi harga dan kelancaran *supply chain* (termasuk distribusi dan tata niaga) komoditas pangan
3. Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan stabilisasi harga dan *supply chain* komoditas pangan
4. Analisis titik kritis dan panjang *supply chain* yang dapat berpengaruh terhadap kelangkaan stok dan fluktuasi harga komoditas pangan.
5. Simpulan efektivitas bauran kebijakan stabilisasi harga dan *supply chain* komoditas pangan
6. Permasalahan (*root cause*) terkait stabilisasi harga dan *supply chain* komoditas pangan
7. Risiko yang belum termitigasi
8. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi





Level Pemerintah Pusat:

1. Analisis ketepatan bauran kebijakan pemenuhan cadangan pangan pemerintah pusat dan daerah atas 14 (empat belas) komoditas
2. Analisis keselarasan kebijakan cadangan pangan pemerintah dan implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (Inpres Nomor 6 Tahun 2025), terutama komoditas Gabah Kering Panen (GKP) any quality, beras, dan jagung (pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan anggaran).
3. Analisis ketepatan perencanaan kebutuhan cadangan pangan pusat dan daerah (termasuk basis data yang digunakan, keselarasan perkiraan dengan kebutuhan riil, dst.)
4. Akuntabilitas kinerja dan keuangan pengelolaan cadangan pangan (termasuk pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran)
5. Analisis kinerja pengelolaan cadangan pangan dalam menjaga stabilitas harga komoditas
6. Simpulan atas efektivitas pelaksanaan program
7. Permasalahan (root cause) terkait pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Pusat yang perlu menjadi perhatian Pemerintah
8. Risiko yang belum termitigasi
9. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi

Level Pemerintah Daerah:

1. Analisis ketepatan kebijakan pemenuhan cadangan pangan pemerintah daerah atas 14 (empat belas) komoditas pangan
2. Analisis ketepatan perencanaan kebutuhan cadangan pangan pemerintah daerah (termasuk basis data yang digunakan, keselarasan perkiraan dengan kebutuhan riil, dst.)
3. Akuntabilitas kinerja dan keuangan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah (termasuk pembelian, penyimpanan, distribusi)
4. Analisis kinerja pengelolaan cadangan pangan dalam menjaga stabilitas harga komoditas
5. Simpulan atas efektivitas pelaksanaan program
6. Permasalahan (root cause) terkait pemenuhan cadangan pangan pemerintah daerah yang perlu menjadi perhatian pemerintah
7. Risiko yang belum termitigasi
8. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi

Peran BUMN dalam Tata Kelola Cadangan Pangan:

1. Analisis kinerja atas implementasi pengadaan gabah/beras dalam negeri mulai dari pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan.
2. Analisis terhadap harga pembelian beras oleh Pemerintah dan kebutuhan anggaran dalam rangka penugasan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG).



KETERJANGKAUAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN

BAGIAN 1



**SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI
HASIL PENGAWASAN PADA 3 TOPIK DI DALAMNYA**

- Gambaran umum ketersediaan, stabilitas harga dan sebaran wilayah atas 14 komoditas pangan.
- Analisis ketepatan kebijakan/*grand design* peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah.
- Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan
- Simpulan efektivitas ketersediaan dan stabilitas harga atas 14 komoditas pangan.
- Risiko yang belum termitigasi.
- Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.

C

TATA KELOLA KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, ENERGI DAN AIR NASIONAL (KSPEAN)



1. Analisis ketepatan kebijakan pengembangan KSPEAN (*grand design* yang melingkupi sisi *on-farm*, *off-farm*, serta keselarasan antar instansi pusat dan pemerintah daerah)
2. Kualitas tata kelola lahan pangan untuk KSPEAN (terkait dengan status lahan, pembagian lahan, dst)
3. Ketersediaan bibit dan pupuk yang sesuai dengan kondisi lahan.
4. Keselarasan kegiatan KSPEAN dengan kegiatan dukungan (irigasi, waduk, bendungan, embung, sumur/pompa bor, jalan, saprodi, alsintan, dst.)
5. Target dan progres penyelesaian pembangunan KSPEAN
6. Pencapaian target produksi dan produktivitas pangan di KSPEAN
7. Efektivitas sistem logistik, pengolahan dan nilai tambah hasil produksi, serta distribusi dan pemasaran berbasis digital
8. Efektivitas korporasi petani (berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan petani)
9. Analisis keberlanjutan produksi lahan pertanian yang mendapat bantuan program KSPEAN pada tahun berikutnya
10. Permasalahan (*root cause*) terkait pengembangan KSPEAN yang perlu menjadi perhatian pemerintah
11. Identifikasi *best practice* pelaksanaan program KSPEAN untuk dapat direplikasi pada KSPEAN lainnya
12. Risiko pelaksanaan KSPEAN yang belum termitigasi
13. Simpulan atas efektivitas pelaksanaan KSPEAN
14. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi KSPEAN



KETAHANAN ENERGI





KETAHANAN ENERGI

Potret ketercapaian/
efektivitas pembangunan
swasembada

Analisis kecukupan,
ketepatan, dan keselarasan
kebijakan swasembada
energi

Efektivitas optimalisasi sumber
energi dalam negeri
(*indigineous resources*) untuk
meminimumkan impor energi
dan sumber energi

Analisis keterjaminan
(*security*) pasokan energi
dalam hal terjadi
keterbatasan produksi dan
atau impor energi

Analisis *success/fail factor*
swasembada energi

Identifikasi ruang
perbaikan swasembada
energi

SIMPULAN TINGKAT SEKTOR INI
DIBANGUN DARI SIMPULAN ANTARA
PADA 2 TEMA DI DALAMNYA





TEMA 1.

**KETERSEDIAAN PASOKAN,
KETERJANGKAUAN,
DAN TRANSISI ENERGI**



TEMA 1.

KETERSEDIAAN PASOKAN, KETERJANGKAUAN, DAN TRANSISI ENERGI



SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 3 TOPIK DI DALAMNYA

- Potret ketercapaian/efektivitas pembangunan swasembada energi
- Analisis kecukupan, ketepatan, dan keselarasan kebijakan swasembada energi
- Efektivitas optimalisasi sumber energi dalam negeri (*indigineous resources*) untuk meminimumkan impor energi dan sumber energi
- Analisis keterjaminan (*security*) pasokan energi dalam hal terjadi keterbatasan produksi dan atau impor energi
- Analisis success/fail factor swasembada energi
- Identifikasi ruang perbaikan swasembada energi

A

KETERSEDIAAN PASOKAN ENERGI (GAS BUMI, MINYAK BUMI, DAN BATUBARA)



1. Analisis kebutuhan dan kecukupan/ketersediaan pasokan energi
2. Analisis Kecukupan, Ketepatan dan Keselarasan Kebijakan ketersediaan pasokan energi
3. Analisis efektivitas prosedur dan Tata kelola Penyediaan pasokan energi dalam mendukung Ketahanan Energi (termasuk supply-demand, ekspor-impor, pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO), cadangan energi, dan sumur minyak masyarakat)
4. Efektivitas Strategi Optimalisasi Eksplorasi dan Produksi energi, termasuk Peningkatan cadangan energi
5. Analisis kecukupan kemudahan perizinan, investasi/pendanaan, dan infratraktur pendukung (termasuk penugasan BUMN energi) dalam mendukung ketersediaan energi
6. Analisis aspek konservasi lingkungan dan adaptasi perubahan iklim
7. Analisis risiko dan pengendalian fraud dalam penyediaan energi
8. Rekomendasi

B

PERLUASAN AKSES DAN KETERJANGKAUAN ENERGI (GAS BUMI, BAHAN BAKAR MINYAK/BBM, DAN LISTRIK)



1. Profil konsumsi (kebutuhan) energi (Gas Bumi, BBM dan listrik)
2. Potret aksesibilitas BBM, Gas Bumi, dan Listrik; serta ketimpangan distribusi energi per wilayah; desa-kota
3. Analisis Kecukupan, Ketepatan dan Keselarasan Kebijakan perluasan akses dan Keterjangkauan Energi
4. Analisis kecukupan dukungan infrastruktur penunjang distribusi energi
 - a. Infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga;
 - b. Analisis opportunity loss dampak keterlambatan pembangunan kilang
 - c. Infrastruktur penunjang distribusi BBM dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Sub Peralur LPG, Tangki dan Kapal)
 - d. pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan distribusi energi dengan teknologi *smart grid* ;
5. Analisis Keterjangkauan harga energi, termasuk ketepatan dan efektivitas subsidi energi
6. Analisis Efektivitas peran BUMN dalam mendukung perluasan akses dan keterjangkauan energi
7. Analisis risiko dan pengendalian fraud
8. Rekomendasi

C

TRANSISI ENERGI MENUJU PEMBANGUNAN RENDAH KARBON



1. Potret pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.
2. Analisis Kecukupan, Ketepatan dan Keselarasan Kebijakan transisi energi
3. Efektivitas diversifikasi energi menuju energi bersih (terutama proyek penyiapan purwarupa hasil riset dan inovasi teknologi nuklir untuk energi, dan penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage/CCS)
4. Efektivitas peningkatan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan (terutama proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
5. Efektivitas perbaikan kebijakan tarif dan subsidi, regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan penyediaan tenaga kerja bidang Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) dalam mendukung pengembangan ekosistem pendukung energi bersih
6. Efektivitas perluasan pemanfaatan biofuel (terutama proyek penyediaan pendanaan untuk volume penyaluran selisih harga biodiesel)
7. Efektivitas Pengembangan teknologi penyimpanan energi dan *microgrid*
8. Analisis Ketersediaan, Ketepatan Alokasi, dan Efektivitas Pendanaan untuk Program transisi energi menuju pembangunan rendah karbon
9. Analisis risiko dan pengendalian *fraud*
10. Rekomendasi

● **PENGUATAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
YANG BAIK
DAN BERSIH**





PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

Analisis daya ungkit
penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dan bersih terhadap
peningkatan kepercayaan publik

Analisis daya ungkit penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih
terhadap pencapaian tujuan
pembangunan nasional

Identifikasi permasalahan aktual
penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dan bersih

Rekomendasi kebijakan dan strategi
keberlanjutan dalam rangka
penguatan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih

SIMPULAN TINGKAT SEKTOR INI
DIBANGUN DARI SIMPULAN ANTARA
PADA 2 TEMA DI DALAMNYA





TEMA 1.

**PENGUATAN TATA KELOLA,
MANAJEMEN RISIKO, DAN
PENGENDALIAN KECURANGAN**



TEMA 2.

**PENGUATAN
TATA KELOLA
TEMATIK**



TEMA 1.

PENGUATAN TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KECURANGAN



**SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI
HASIL PENGAWASAN PADA 3 TOPIK DI DALAMNYA**

- Analisis profil dan kualitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian kecurangan
- Analisis efektifitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian kecurangan dalam mendorong akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
- Analisis efektifitas pengawasan intern dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional
- Rekomendasi kebijakan dan strategi keberlanjutan dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

A

KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)



1. Identifikasi sebaran dan kapabilitas APIP
 - a. Pemetaan kuantitas dan kualitas APIP di K/L/D (komposisi kelembagaan, kompetensi auditor, sertifikasi profesi).
 - b. Analisis kesenjangan kapasitas antar daerah dan K/L, termasuk variasi ketersediaan SDM, infrastruktur, dan dukungan anggaran.
 - c. Identifikasi ketidakseimbangan antara mandat pengawasan dengan sumber daya yang tersedia, baik pada aspek volume penugasan, cakupan pengawasan, maupun kompleksitas isu yang harus diawasi.
2. Analisis efektivitas pengawalan APIP
 - a. Evaluasi peran APIP dalam siklus manajemen kinerja pemerintah (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban).
 - b. Pemetaan peran pengawasan APIP dalam mendorong pencapaian program prioritas nasional/daerah (termasuk PHTC), beserta analisis efektivitas peran tersebut.
 - c. Analisis efektivitas pengawalan *Governance, Risk, and Compliance (GRC) framework*; dan
 - d. Analisis implementasi *early warning system*, *reviu*, dan pengawalan berbasis risiko.
3. Evaluasi tata kelola pengawasan APIP
 - a. Analisis manajemen organisasi APIP (struktur, independensi, akuntabilitas, tata hubungan dengan pimpinan).
 - b. Analisis kualitas penerapan *risk-based audit*
 - c. Telaah integrasi hasil pengawasan APIP dengan proses pengambilan keputusan pemerintah.
4. Analisis kebermanfaatan APIP terhadap pembangunan
 - a. Evaluasi kontribusi hasil pengawasan APIP terhadap perbaikan akuntabilitas keuangan negara/daerah.
 - b. Analisis dampak pengawasan APIP terhadap efektivitas program pembangunan (misalnya peningkatan kualitas layanan publik, capaian indikator RPJMN/RPJMD).
 - c. Identifikasi potret keberhasilan dan keterbatasan peran APIP dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan *good governance*
5. Identifikasi permasalahan dan hambatan penguatan APIP, meliputi:
 - a. Kesenjangan kapasitas SDM, keterbatasan anggaran, dan lemahnya *mandate enforcement*.
 - b. Terganggunya independensi APIP karena positioning organisasi dan tata hubungan kelembagaan.
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi *audit digital*, *data analytics*, dan *continuous auditing*.
 - d. Rendahnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.
6. Analisis risiko fraud dan risiko kelemahan tata kelola
 - a. Identifikasi kerentanan APIP dalam mendeteksi, mencegah, dan memastikan efektivitas pengendalian risiko *fraud* pada K/L/D.
 - b. Analisis kapabilitas APIP dalam mengawasi area berisiko tinggi, misal:
 - PBJ, sektor dan program yang jadi mandat K/L untuk APIP K/L; atau
 - PBJ daerah, pengelolaan TKD, dana desa, dan pembiayaan daerah untuk APIP Daerah.
7. Rekomendasi strategi penguatan kapabilitas APIP.





1. Analisis profil fraud pada K/L/D/BU:

- Pemetaan modus kecurangan pada sektor pembangunan dan pelayanan publik, termasuk faktor pemicu dan skenario pelaksanaan modus.
- Analisis signifikansi dampak: material (keuangan, aset, kerugian negara) dan non-material (kepercayaan publik, reputasi, kualitas layanan).
- Identifikasi kelemahan sistem cegah, deteksi, dan respon yang membuat *fraud* berulang atau sulit diberantas.

2. Evaluasi Sistem Pengendalian Kecurangan

- Telaah keberadaan desain kebijakan, regulasi, dan mekanisme pengendalian kecurangan di K/L/D/BU.
- Analisis kecukupan infrastruktur pengendalian (SOP, unit khusus, *whistleblowing system*, audit internal, perlindungan pelapor).
- Identifikasi kesenjangan antara desain sistem dengan praktik aktual di lapangan.

3. Analisis Efektivitas Implementasi Cegah-Deteksi-Respon

- Pengujian sejauh mana kebijakan dan instrumen pengendalian diterapkan secara konsisten.
- Analisis responsivitas mekanisme deteksi dini (*early warning*), investigasi, dan tindak lanjut *fraud*, dan
- Identifikasi kelemahan pelaksanaan: minimnya kapasitas SDM, intervensi kepentingan, dan lemahnya koordinasi antaraktor.

4. Penguatan Tata Kelola Data

- Evaluasi validitas, akurasi, dan integrasi data keuangan maupun non-keuangan yang digunakan untuk mendeteksi anomali.
- Identifikasi risiko manipulasi atau rekayasa dalam pengelolaan data yang berpotensi memicu *fraud*.
- Strategi pemanfaatan *big data*, *data analytics*, dan *continuous auditing* untuk meningkatkan deteksi *fraud*.

Strategi Penguatan dan Keberlanjutan Sistem Pengendalian Kecurangan

- Penerapan kerangka Cegah-Deteksi-Respon yang adaptif pada berbagai sektor/tingkat pemerintahan dan BUMN/BUMD.
- Penguatan integritas kelembagaan melalui budaya anti-fraud, perlindungan pelapor, dan sanksi yang konsisten.
- Kolaborasi lintas lembaga untuk menutup celah pengawasan dan mendorong sinergi pencegahan.

Rekomendasi Kebijakan



1. Analisis Kualitas Perencanaan Strategis dan Penetapan Tujuan K/L/D

- Analisis ketepatan dan keselarasan penetapan tujuan K/L/D dalam mendukung PHTC sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- Evaluasi keselarasan tujuan organisasi dengan RPJMN/RPJMD, termasuk kualitas penyusunan indikator kinerja.
- Analisis konsistensi cascading kinerja antar level organisasi serta keakuratan target; dan
- Telaah efektivitas strategi pencapaian tujuan, meliputi efisiensi sumber daya dan fokus pada hasil (*outcome*).

2. Analisis Infrastruktur SPIP di K/L/D

- Komitmen pimpinan dan budaya organisasi dalam membangun pengendalian intern.
- Telaah kebijakan, mandat, prosedur, dan sistem tata kelola, manajemen risiko, pengendalian fraud, serta kepatuhan.
- analisis struktur kelembagaan yang menangani fungsi tata kelola, risiko, fraud control, dan kepatuhan.
- Dukungan SDM (kompetensi, sertifikasi), keuangan, dan fasilitas/sarpras.
- Kualitas sistem komunikasi dan koordinasi internal serta eksternal.
- Evaluasi keberadaan dan efektivitas kanal pengaduan dan sistem pengendalian korupsi.

3. Analisis Penyelenggaraan SPIP oleh K/L/D

- Evaluasi implementasi manajemen risiko, termasuk risiko fraud.
- Telaah penerapan risk-based planning serta dukungan perencanaan K/LD terhadap pencapaian Program Prioritas Nasional/Daerah.
- Analisis pengendalian atas data dan sistem informasi (akses, kewenangan, pencatatan, dan dokumentasi).
- Analisis pengendalian keuangan dan aset (otorisasi, pencatatan, rekonsiliasi, dokumentasi).
- Evaluasi efektivitas mekanisme reviu dan monitoring kinerja.

4. Analisis Evaluasi Penyelenggaraan SPIP oleh K/L/D

- keberadaan mekanisme penilaian mandiri (*self-assessment*) dan penilaian eksternal.
- Analisis kualitas tindak lanjut atas hasil evaluasi SPIP.
- Integrasi hasil evaluasi SPIP ke dalam proses pengambilan keputusan.

5. Analisis Ketercapaian dan Akuntabilitas Tujuan Organisasi

- Evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi dari sisi efektivitas dan efisiensi.
- Analisis akuntabilitas keuangan (keterandalan laporan keuangan, kepatuhan standar akuntansi).
- Analisis akuntabilitas aset (pengamanan, pencatatan, optimalisasi pemanfaatan).
- Analisis akuntabilitas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Hambatan dan Tantangan Penyelenggaraan SPIP di K/L/D

- Kesenjangan kapasitas SDM dan lemahnya komitmen pimpinan.
- Keterbatasan anggaran dan infrastruktur pendukung.
- Fragmentasi kelembagaan dan lemahnya koordinasi antar unit/instansi.
- Rendahnya pemanfaatan teknologi pengendalian intern berbasis data.
- Tingginya risiko fraud pada area tertentu (misal: PBJ, perizinan, dan pengelolaan aset).

7. Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan SPIP di K/L/D



PENGUATAN TATA KELOLA TEMATIK

**SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI
HASIL PENGAWASAN PADA 3 TOPIK DI DALAMNYA**

A

KEMUDAHAN PERIZINAN DI DAERAH



1. Analisis kebijakan/regulasi dan tata kelola perizinan, meliputi:
 - a. Analisis regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah terkait perizinan berusaha.
 - b. Analisis sinkronisasi regulasi pusat-daerah untuk mendukung kemudahan perizinan & iklim investasi.
 - c. Evaluasi tata kelola perizinan.
2. Potret investasi dan potensi daerah:
 - a. Analisis realisasi investasi daerah dan kontribusi sektor unggulan.
 - b. Pemetaan potensi ekonomi daerah (misal: sumber daya alam, industri kreatif, pariwisata, manufaktur, UMKM).
 - c. Analisis perbandingan antara jumlah permohonan izin, izin terbit, dan realisasi usaha/investasi.
3. Implementasi kemudahan perizinan di daerah:
 - a. Evaluasi efektivitas layanan perizinan terpadu (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)), termasuk kualitas layanan publik perizinan (kecepatan, transparansi, dan aksesibilitas); dan
 - b. Identifikasi hambatan operasional (misal: SDM, infrastruktur digital, koordinasi antar perangkat daerah).
4. Akuntabilitas dan efektivitas tata kelola perizinan, meliputi:
 - a. Analisis transparansi dan integritas proses penerbitan perizinan.
 - b. Analisis manfaat kemudahan perizinan terhadap peningkatan investasi, PAD, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Peran Pengawasan atas Kemudahan Perizinan, meliputi:
 - a. Analisis efektivitas mekanisme pengawasan pemerintah daerah terhadap kepatuhan pelaku usaha.
 - b. Evaluasi mekanisme monitoring, pelaporan, dan tindak lanjut kewajiban pelaku usaha.
 - c. Analisis peran APIP dalam pengawasan perizinan dan implementasi kebijakan kemudahan investasi.
6. Analisis Risiko Kecurangan dan Mitigasi Risiko, meliputi:
 - a. Identifikasi potensi *fraud* dan maladministrasi dalam perizinan (pungli, perizinan fiktif, konflik kepentingan, manipulasi data, dst.).
 - b. Analisis risiko dampak negatif, termasuk dampak terhadap lingkungan, dari relaksasi perizinan.
 - c. Evaluasi efektivitas mitigasi risiko melalui pengendalian internal, digitalisasi layanan, dan transparansi data publik.
7. Root cause analysis atas kendala perizinan, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Kesenjangan regulasi Pusat-Daerah dan tumpang tindih kewenangan
 - b. Rendahnya kapasitas SDM dan kualitas layanan DPMPSTP;
 - c. Lemahnya integrasi data perizinan dengan sistem pusat;
 - d. Minimnya mekanisme pengawasan yang efektif, termasuk perlindungan dari praktik kecurangan; dane. hambatan birokrasi, budaya rente, dan resistensi terhadap reformasi perizinan.
8. Rekomendasi perbaikan.



B

PENANGGULANGAN BENCANA



1. Potret kesiapan daerah (terutama risiko bencana tinggi) dalam menghadapi bencana
2. Analisis ketepatan, kecukupan dan keselarasan kebijakan pada K/L/D terkait Penanggulangan Bencana:
 - a. pengurangan risiko bencana
 - b. penurunan tingkat kerentanan bencana
 - c. peningkatan kapasitas penanggulangan bencana
3. Analisis tata kelola dan koordinasi kelembagaan stakeholder K/L/D dalam Penanggulangan Bencana (baik tahapan pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana)
4. Analisis implementasi penanggulangan bencana, minimal terkait:
 - a. pengurangan risiko bencana (Peta Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi)
 - b. penurunan tingkat kerentanan bencana (Informasi Kebencanaan kepada Masyarakat)
 - c. peningkatan kapasitas penanggulangan bencana (SDM, Sistem Peringatan Dini, Tim Reaksi Cepat, Pemenuhan Kebutuhan Dasar (pendidikan, kesehatan, rumah, pangan dsb) ketika terjadi bencana, Manajemen kebutuhan Dasar dan Logistik)
5. Akuntabilitas dan tata kelola pendanaan penanggulangan bencana:
 - a. Dana siap pakai;
 - b. *Pooling fund* bencana;
 - c. Dana rekonstruksi dan rehabilitasi; dan
 - d. Dana/barang bantuan masyarakat dan luar negeri
6. Analisis efektivitas penanggulangan bencana
7. Identifikasi hambatan dan *root cause* permasalahan
8. Rekomendasi perbaikan

C

PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH



1. Analisis disparitas antara kebijakan percepatan transformasi digital pemerintah, termasuk terkait pengembangan DTSEN, digitalisasi Perlinsos, Digitalisasi Perizinan (OSS), dan pemanfaatan Digital *Public Infrastructure* (DPI), dengan *best practice* dan standar internasional (*policy disparity*)
2. Analisis keselarasan antara kebijakan terkait percepatan pembangunan transformasi digital dengan regulasi yang berlaku pada masing-masing proses bisnis dan instansi terkait (*policy alignment*)
3. Analisis gap antara implementasi percepatan transformasi digital dengan kebijakan/regulasi (*compliance gap*)
4. Analisis progres capaian program percepatan transformasi digital (*performance gap*), termasuk progress capaian fisik infrastruktur dan akuntabilitas keuangan program.
5. Analisis efektifitas pelaksanaan percepatan transformasi digital pemerintah,
6. Analisis kerentanan pengendalian intern dalam sistem dan prosedur digitalisasi perlinsos (*control gap*)
7. Analisis risiko program/kegiatan/entitas, risiko lintas sektor, dan risiko *fraud* terkait proses digitalisasi perlinsos dan perizinan (*risk gap*)
8. Rekomendasi perbaikan GRCCACD Tata Kelola Pemerintah Digital



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

KALENDER PENYAMPAIAN
HASIL PENGAWASAN
PRIORITAS



Sektor/Tema/Topik	Triwulan				Unit Pelaksana									
	I	II	III	IV	D1	D2	D3	D4	D5	D6	RJ	JF	SU	
A. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL DAN BERDAYA SAING				◆		✓								
Pendidikan				◆		✓								
Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas				◆		✓								
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Tinggi				◆		✓								
PHTC Bidang Pendidikan (Digitalisasi Pendidikan, Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas, serta Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul)	◆		◆			✓								
PHTC Makan Bergizi Gratis	◆	◆	◆	◆			✓							
Kesehatan		◆				✓								
Revitalisasi Integrasi Layanan Primer dan PHTC Pemeriksaan Kesehatan Gratis	◆	◆	◆			✓								
Penguatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Lanjutan		◆				✓								
PHTC Bidang Kesehatan (Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Pembangunan RS Lengkap Berkualitas)	◆		◆			✓								
PHTC Pengentasan Tuberkulosis	◆		◆			✓								
Pencegahan dan Penurunan Stunting			◆			✓								
B. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				◆			✓							
Pengentasan Kemiskinan		◆					✓							
Tata Kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)		◆					✓							
Perlindungan Sosial Melalui Pengurangan Beban dan Peningkatan Pendapatan (Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif)		◆					✓							
Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan				◆			✓							
PHTC Sekolah Rakyat	◆		◆				✓							
Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masyarakat				◆			✓							
PHTC Tata Kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	◆	◆	◆	◆			✓							
Tata kelola Peningkatan Akses Pembiayaan bagi UMKM		◆		◆			✓							
Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional				◆			✓							
C. PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS				◆	✓									
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas				◆	✓									
Infrastruktur Jaringan Jalan dan Jembatan (termasuk jalan tol)			◆		✓									
Infrastruktur Pelabuhan			◆		✓									
Infrastruktur Bandara			◆		✓									

Sektor/Tema/Topik	Triwulan				Unit Pelaksana									
	I	II	III	IV	D1	D2	D3	D4	D5	D6	RJ	JF	SU	
Infrastruktur Perkeretaapian			◆		✓									
Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar yang Berkualitas				◆	✓									
Penyediaan Perumahan Rakyat yang Layak Huni dan Terjangkau (Termasuk Program Penyediaan 3 Juta Rumah)		◆		◆	✓									
Penyediaan air baku (jaringan irigasi) dan air minum (SPAM) yang layak dan berkualitas			◆		✓									
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Persampahan	◆	◆					✓							
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAN KEKAYAAN NEGARA/DAERAH YANG DIPISAHKAN		◆		◆	✓									
Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Pusat		◆		◆	✓									
Optimalisasi Penerimaan Perpajakan		◆		◆	✓									
Optimalisasi PNB		◆		◆	✓									
Tata Kelola Pertambangan dalam Kawasan Hutan	◆	◆	◆	◆						✓				
Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan	◆	◆	◆	◆						✓				
Efektivitas Belanja Perpajakan				◆	✓									
Efektivitas Implementasi Kebijakan Efisiensi Alokatif Belanja Pemerintah Pusat	◆				✓									
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat (Termasuk PBJ Sebagai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja)		◆		◆	✓									
Pengelolaan Pembiayaan Utang Pemerintah	◆			◆	✓									
Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah/Desa		◆		◆				✓						
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah		◆						✓						
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah		◆						✓						
Disiplin Belanja Pemerintah Daerah	◆	◆	◆	◆				✓						
Pengelolaan Pembiayaan Daerah			◆					✓						
Efektivitas Transfer Fiskal di Daerah (DAU, DAK, dan DBH)		◆						✓						
Efektivitas Dana Otonomi Khusus			◆					✓						
Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa				◆				✓						
Tata Kelola PBJ Daerah			◆					✓						
Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah yang Dipisahkan				◆					✓					
Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BUMN/Danantara		◆		◆					✓					
Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BUMD				◆					✓					
Akuntabilitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan BLU/BLUD				◆					✓					



Sektor/Tema/Topik	Triwulan				Unit Pelaksana									
	I	II	III	IV	D1	D2	D3	D4	D5	D6	RJ	JF	SU	
E. TRANSFORMASI EKONOMI				◆	✓									
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri dalam Negeri			◆		✓									
Penguatan Daya Saing Industri Pengolahan			◆		✓									
Penyelamatan Industri Padat Karya			◆		✓									
Percepatan Pembangunan Ekosistem Industri Baterai			◆		✓									
Penguatan Investasi dan Kemudahan Perizinan			◆		✓									
Pengembangan Industri Pariwisata yang Berkualitas				◆	✓									
Tata Kelola Keamanan dan Mutu Produk Industri dalam Kemasan				◆	✓									
Peningkatan Keterserapan dan Perlindungan Tenaga Kerja				◆	✓									
Penguatan Perlindungan Tenaga Kerja				◆	✓									
Peningkatan Keterserapan Tenaga Kerja				◆	✓									
Pengembangan Kawasan dan Pembangunan Kewilayahan			◆		✓									
Pengembangan Kawasan Sentra Ekonomi dan Perdagangan			◆		✓									
Penguatan Pertumbuhan Ekspor dan Perdagangan Domestik Berbasis Kewilayahan			◆		✓									
Pengembangan Kawasan Transmigrasi			◆		✓									
Pengawasan Kewilayahan Pembangunan Perkotaan (Urban Development)			◆					✓						
F. Ketahanan Pangan			◆				✓							
Peningkatan Produksi Pangan			◆				✓							
Tata Kelola Lahan Pertanian			◆				✓							
Tata Kelola Program Bibit dan Benih Unggul			◆				✓							
Tata Kelola Pupuk Bersubsidi	◆		◆				✓							
Peningkatan Infrastruktur Pangan Nasional			◆				✓							
Peningkatan Dukungan Peralatan Produksi Pangan (Alsintan)			◆				✓							
Penanganan Pasca Panen			◆				✓							
Pendayagunaan Penyuluh Pertanian			◆				✓							
Keterjangkauan dan Ketersediaan Pangan			◆				✓							
Stabilisasi Harga dan Supply Chain Komoditas Pangan	◆	◆	◆	◆			✓							
Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah			◆				✓							

Sektor/Tema/Topik	Triwulan				Unit Pelaksana									
	I	II	III	IV	D1	D2	D3	D4	D5	D6	RJ	JF	SU	
Tata Kelola Kawasan Sentra Produksi Pangan (Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Selatan)		◆		◆			✓							
G. KETAHANAN ENERGI		◆		◆	✓									
Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan, dan Transisi Energi		◆		◆	✓									
Ketersediaan Pasokan Energi (Gas Bumi, Minyak Bumi, dan Batubara)		◆		◆	✓									
Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi (Gas Bumi, BBM, dan Listrik)		◆		◆	✓									
Transisi Energi Menuju Pembangunan Rendah Karbon				◆	✓									
H. PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH				◆							✓			
Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kecurangan				◆							✓			
Kapabilitas APIP		◆		◆								✓		
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		◆		◆							✓			
Pengendalian Kecurangan		◆		◆						✓				
Penguatan Tata Kelola Tematik				◆									✓	
Kemudahan Perizinan di Daerah			◆					✓						
Penanggulangan Bencana			◆			✓								
Percepatan Transformasi Digital Pemerintah	◆	◆	◆	◆		✓								



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN**

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Jl. Pramuka No 33 Jakarta Timur, 13120

www.bpkp.go.id